

**Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota
Semarang**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Kharisma Damayanti

1906016128

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Kharisma Damayanti

NIM : 1906016128

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata
Nongkosawit Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Maret 2024

Pembimbing,



M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP.198505022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
NONGKOSAWIT KOTA SEMARANG

Disusun Oleh :

Kharisma Damayanti

1906016128

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
Pada tanggal 05 Februari 2024 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Drs. Nur Syamsudin, MA
NIP.196805051995031002

Sekretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Nuqlir Bariklana'.

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP.198409092019031007

Penguji Utama 1

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masrohatun'.

Masrohatun, M.Si
NIP.198806212018012001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan ataupun yang tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka pada penulisan skripsi ini.

Semarang, 08 Januari 2024



Kharisma Damayanti
NIM: 1906016128

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S. Sos) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan pendidikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum., selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, Drs, Nur Syamsudin M.Ag., dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarrang, Muhammad Mahsun M.A., yang telah memberikan pengarahan dan ilmunya teutama dalam pelaksanaan perkuliahan
4. M. Nuqlir Bariklana M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun, memotivasi, memberi masukan maupun arahan, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi
5. Seluruh dosen pengejar serta staf administrasi di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah

membekali dengan berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulis memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat

6. Seluruh anggota Pokdarwis Kandang Gunung di Desa Wisata Nongkosawit, terutama Bapak Warsono selaku ketua Pokdarwis, dan Lurah serta masyarakat Nongkosawit yang telah memberikan izin dan informasi serta data pada penelitian skripsi penulis.
7. Divisi Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Taufiq yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta memberikan data dan informasi-informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Kedua orangtua penulis, Ibu Sri Sumiyanti dan Bapak Kusno yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Tak lupa Kepada kakek penulis, Diono dan juga anggota keluarga lainnya yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moral maupun materil sehingga penulis berhasil di tahap penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan S1 Ilmu Politik D angkatan 2019 dan teman-teman lain yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi.
10. Teman terdekat penulis, Nurul, Satirah, Khani, Hana, Lathfah, dan Vera yang telah terus memberikan dukungan dan juga semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Serta kepada teman-teman disekitar rumah yang turut menjadi saksi dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kiki Kurnia salah satu orang yang selalu menjadi support system bagi penulis selama proses penulisan skripsi. Terimakasih telah berkontribusi banyak pada proses penulisan skripsi ini. Memberi dukungan, semangat, materi dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang selama ini, sehingga dapat berada di tahap ini dan menyelesaikan penyusunan skripsi serta mewujudkan apa yang telah diimpikan selama ini.

Kepada semua pihak-pihak yang terlibat penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan, semoga kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dalam susunan kalimat

maupun tata bahasa. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun referensi penelitian yang sejenis, serta memberikan manfaat bagi para pembaca karya karya tulis ilmiah ini.

Semarang, 08 Januari 2024

Kharisma Damayanti

NIM: 1906016128

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis yang telah memberikan doa dan menjadi penyemangat kepada penulis. Tak lupa kepada kakek penulis yang selama ini telah memberikan banyak dukungan secara moral maupun materil.

Kepada Dosen Pembimbing saya, M. Nuqlir Briklana M.Si yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang serta teman-teman seperjuangan yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis, semoga setiap ilmu tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya Kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

ABSTRAK

Desa/Kelurahan Nongkosawit sebelumnya telah menjadi Desa Vokasi pada tahun 2009 yang mewakili Kecamatan Gunungpati. Transformasi Kelurahan Nongkosawit sebagai Desa Vokasi menjadi Desa Wisata berdasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Nongkosawit. Berdasarkan pada peraturan menteri tersebut, usulan Kelurahan Nongkosawit menjadi Desa Wisata disetujui dan ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui SK Walikota Semarang Nomor 665/407 tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Namun dalam pengembangannya, Desa Wisata Nongkosawit belum berkembang dibandingkan dengan Desa Wisata Kandri dan Desa Wisata Wonolopo yang terus melakukan pengembangan di lingkungan desa wisatanya. Peran dari para aktor pelaksana berpengaruh pada proses dan keberhasilan dari program yang telah dirancang sebelumnya. Untuk itu pada penelitian ini mengkaji mengenai implementasi program pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dan relasi dari pada aktor-aktor yang terlibat melalui teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, ketertinggalan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dari desa wisata lainnya karena proses implementasi program yang dijalankan tidak berjalan dengan baik. Program yang telah dibentuk baik oleh Disbudpar maupun Pokdarwis tidak berjalan dengan baik karena kurangnya respon dari lembaga pelaksana seperti Disbudpar dan Kelurahan dalam hal pendanaan. Selain itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat dan adanya pandangan yang berbeda antar aktor pelaksana, serta respon tingkat kepatuhan yang masih sangat sedikit. Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit membutuhkan strategi untuk menarik para aktor pelaksana agar ikut terlibat dalam proses implementasi, sosialisasi dan pembinaan secara khusus pada Desa Wisata Nongkosawit juga menjadi hal yang perlu untuk direalisasikan.

Kata Kunci : Desa Wisata, Implementasi Kebijakan, Relasi Aktor

ABSTRACT

Nongkosawit Village/Subdistrict previously became a Vocational Village in 2009 representing Gunungpati District. The transformation of Nongkosawit Village as a Vocational Village into a Tourism Village is based on Minister of Culture and Tourism Regulation Number PM.26/UM.001/MKP/2010 concerning General Guidelines for the National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri Tourism Through Tourism Villages with the aim of improving the economy of the community in Nongkosawit. Based on the ministerial regulation, the proposal for Nongkosawit Village to become a Tourist Village was approved and designated as a Tourism Village through Semarang Mayor Decree Number 665/407 concerning the Designation of Kandri Village and Nongkosawit Village, Gunungpati District and Wonolopo Village, Mijen District as Semarang City Tourist Villages. However, in its development, Nongkosawit Tourism Village has not developed compared to Kandri Tourism Village and Wonolopo Tourism Village which continue to develop their tourist village environment. The role of implementing actors influences the process and success of previously designed programs. For this reason, this research examines the implementation of the Nongkosawit Tourism Village development program and the relationships between the actors involved through Merilee S. Grindle's policy implementation theory. Data sources in this research use primary data and secondary data with research data collection using interview, observation and documentation methods. Meanwhile, to analyze the data using a qualitative approach. The results of this research show that the development of the Nongkosawit Tourism Village is lagging behind other tourist villages because the program implementation process is not going well. The programs that have been established by both Disbudpar and Pokdarwis are not running well due to a lack of response from implementing agencies such as Disbudpar and Subdistricts in terms of funding. Apart from that, there is a lack of participation from the community and there are different views between implementing actors, as well as a very low level of response to compliance. The development of the Nongkosawit Tourism Village requires a strategy to attract implementing actors to be involved in the implementation process, socialization and guidance specifically for the Nongkosawit Tourism Village are also things that need to be realized.

Keywords : Tourist Village, Policy Implementation, Actor Relations

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Implementasi Kebijakan Desa Wisata	6
2. Pengembangan Desa Wisata	8
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Definisi Konseptual	13

3.	Sumber Data	13
4.	Teknik Pengumpulan Data	14
5.	Teknik Analisis Data	15
F.	Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN		18
A.	Kebijakan Publik.....	18
B.	Implementasi Kebijakan.....	19
C.	Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.....	22
BAB III POTRET KOTA SEMARANG DAN DESA WISATA NONGKOSAWIT ...		25
A.	Potret Umum Kota Semarang	25
1.	Potret Geografis Kota Semarang.....	25
2.	Potret Demografis Kota Semarang	26
3.	Potret Sosial Politik dan Ekonomi Kota Semarang	28
B.	Potret Umum Desa/Kelurahan Wisata Nongkosawit	31
1.	Potret Geografis Desa/Kelurahan Wisata Nongkosawit.....	31
2.	Potret Kependudukan dan Keagamaan Desa/Kelurahan Nongkosawit.....	32
3.	Potret Pendidikan Desa/Kelurahan Nongkosawit	33
4.	Potret Perekonomian Desa/Kelurahan Nongkosawit.....	34
5.	Potret Kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan Nongkosawit	35
C.	Potret Pokdarwis dan Desa Wisata Nongkosawit.....	36
1.	Potret Pokdrwis Kandang Gunung.....	36
2.	Potret Potensi Desa Wisata Nongkosawit	37
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA SK WALIKOTA SEMARANG NOMOR 556/407		47
A.	Awal Pembentukan Desa Wisata Nongkosawit.....	47
B.	Analisis Program Kebijakan Pengembangan Desa Wisata	53

1. Program Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit.....	53
2. Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	69
C. Perubahan Kelurahan Nongkosawit Sebagai Desa Wisata	75
BAB V RELASI ANTAR STAKEHOLDER DESA WISATA NONGKOSAWIT	83
A. Koordinasi Keterlibatan Para Aktor Dalam Implementasi	83
1. Koordinasi Disbudpar Kota Semarang dengan Pokdarwis	84
2. Koordinasi Pokdarwis dengan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit	86
B. Karakteristik Kelembagaan.....	90
C. Respon Masyarakat dan Kepatuhan Implementasi.....	93
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kota Semarang	27
Tabel 3. 2 Tabel Penduduk Menurut Kelompok Usia Pada Tahun 2022	32
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Pada Tahun 2022	33
Tabel 3. 4 Jumlah Peternakan Pada Tahun 2022	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Semarang.....	26
Gambar 3. 2 Peta Administratif Desa/Kelurahan Nongkosawit.....	31
Gambar 3. 3 Struskur Organisasi Kelurahan Nongkosawit.....	36
Gambar 3. 4 Omah Pang.....	39
Gambar 3. 5 Wayang Ringut.....	39
Gambar 3. 6 Pagelaran Wayang Ringut.....	40
Gambar 3. 7 Wedang Rojo.....	40
Gambar 3. 8 Aksesoris Jenetri.....	41
Gambar 3. 9 Peternakan Sapi.....	41
Gambar 3. 10 Peternakan Kambing.....	42
Gambar 3. 11 Sendang Cilik.....	42
Gambar 3. 12 Curug atau Air Terjun Mah Tukung.....	43
Gambar 3. 13 Tari Kuntulan.....	43
Gambar 3. 14 Taman Baca Digital.....	44
Gambar 3. 15 Makanan Olahan Singkong.....	45
Gambar 3. 16 Tanaman Singkong RW 5 Getas.....	45
Gambar 3. 17 Maskot Desa Wisata Nongkosawit.....	46
Gambar 3. 18 Gerbang Masuk Desa Wisata Nongkosawit.....	46
Gambar 4. 1 Paket Wisata Desa Wisata Nongkosawit.....	65
Gambar 4. 2 Peta Desa Wisata Nongkosawit.....	67
Gambar 4. 3 Hasil Rapat Tentang Program Peningkatan Desa Wisata.....	73
Gambar 5. 1 Sosialisasi Pembinaan Desa Wisata.....	86
Gambar 5. 2 Sosialisasi Pembinaan Desa Wisata.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian di Kelurahan Nongkosawit	104
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian di Disbudpar Kota Semarang	105
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penelitian	106
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Staf Disbudpar	107
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Lurah Nongkosawit	107
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Pokdarwis dan Masyarakat.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata menjadi salah satu penunjang meningkatnya perekonomian bagi negara maupun masyarakat. Hal ini karena pariwisata memiliki *multiplier effect* yang cakupannya luas sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, dengan adanya *multiplier effect* yang luas ini juga akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan melalui retribusi. Peningkatan pendapatan ini disebabkan karena semakin luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat setempat ataupun pendatang tidak hanya pada lokasi pariwisata setempat saja. Melainkan juga terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi di luar lokasi pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita dari masyarakat (Mardiasmo, 2002). Salah satu kota yang mempunyai cukup banyak sektor wisata menarik untuk dijadikan sebagai destinasi wisata yaitu Kota Semarang. Destinasi wisata yang ada terdapat pula keragamannya mulai dari wisata sejarah, budaya, alam, dan wisata buaatannya yang memiliki daya tarik tersendiri (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020). Berlandaskan atas data pada buku statistik pariwisata Jawa Tengah tahun 2021, Kota Semarang memiliki berbagai daya tarik diantaranya ada 17 pada wisata alam, 2 pada wisata budaya, 9 pada wisata buaatnnta, 4 merupakan wisata khusus, dan 14 wisata yang lainnya, selain itu juga ada 10 desa wisata.

Berdasarkan dari berbagai daya tarik wisata dan beragam desa wisata di Kota Semarang, peneliti tertarik untuk mengkaji pada obyek desa wisata. Desa wisata didefinisikan sebagai wilayah pedesaan yang wilayahnya masih mempunyai keadaan asli dan khas oleh sosial kehidupan dan perekonomiannya, budaya, adat dan istiadat, pola hidup keseharian masyarakat, serta mempunyai keunikan atau keaslian pada bentuk bangunan dan penataan desa. Selain itu juga ada berbagai potensi yang dapat guna dilakukan pengembangan seperti atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, serta obyek wisata yang lain yang memiliki ciri khas (Hadiwijoyo, 2012). Terbentuknya berbagai desa wisata akan dapat meningkatkan

variasi pariwisata yang ada. Selain itu, desa wisata juga menjadi pariwisata yang tergolong unik karena terbentuknya desa wisata yaitu bertujuan untuk memperlihatkan potensi yang unik seperti adat-istiadat, sosial budaya, keseharian masyarakat desa, keunikan alam, dan potensi lain untuk dikembangkan yang berbeda dari daerah-daerah lainnya. Sehingga hal tersebut yang suatu saat hendak menjadi suatu daya tarik tersendiri untuk wisatawan mengunjungi desa wisata, semakin tinggi tingkat pengunjung maka akan menjadi hal baik bagi pengembangan desa wisata tersebut. Untuk itu, pengembangan desa wisata harus terus diupayakan agar potensi yang dimiliki oleh desa dapat ditunjukkan baik di tingkat nasional ataupun internasional (Sudibya, 2018).

Desa wisata yang menjadi obyek pada penelitian ini yaitu Desa Wisata Nongkosawit yang lokasinya ada dalam Kelurahan Nongkosawit, Kota Semarang. Desa wisata ini mempunyai potensi desa yang mampu dilakukan pengembangan dengan penduduknya yang masih mempunyai tradisi serta budaya yang terbilang masih relatif asli. Keunggulan lain dari desa wisata ini yaitu adanya makanan khas, tradisi dan adat yang berbeda dari daerah lain, sistem pertanian dan sosial yang juga ikut mewarnai kawasan Desa Wisata Nongkosawit tersebut. Selain itu, kawasan di desa wisata ini merupakan kawasan yang alam dan lingkungannya masih terbilang asli dan terjaga yang ialah bagian dari aspek yang berarti untuk tujuan kawasan desa wisata. Desa Wisata Nongkosawit mempunyai berbagai potensi sebagai daya tarik wisata yang sangat beragam diantaranya yaitu wisata peternakan (meliputi ternak sapi perah, ayam, dan kambing), perkebunan buah dan sayur, dolanan tradisional dan gamelan, wisata sendang dan sejarahnya, sentra pembuatan tape dan jajan tradisional lainnya, sentra produksi batik tulis, penangkaran burung langka, kirab kyai bande, kerajinan bambu, dan juga terdapat Curug Mah Tukung yang hingga saat ini masih belum terjamah. Potensi lainnya yaitu desa wisata yang terlihat masih relatif asri sehingga mampu menjadi daya tarik dalam berwisata di Desa Wisata Nongkosawit.

Desa Wisata Nongkosawit memiliki daya tarik dengan berbagai potensi yang ada untuk dijadikan sebagai wisata dengan keunikan-keunikannya. Potensi yang dimiliki Desa Wisata Nongkosawit diantaranya yaitu terdapat air terjun mahtukung,

obyek wisata omah pang, tari kuntulan, wedang rojo, wayang ringut, batik khas nongkosawit, gelang dan kalung jenetri, serta budaya dan keragaman lainnya di masyarakat Desa Wisata Nongkosawit. Berdasarkan dari keragaman potensi yang dimiliki tersebut Kelurahan Nongkosawit ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui SK Walikota Semarang Nomor 556/407 Tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nnongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang pada tanggal 21 Desember 2012. Setelah ditetapkannya Kelurahan Nongkosawit sebagai desa wisata, Desa Wisata Nongkosawit masih perlu untuk terus melakukan pengembangan agar menjadi desa wisata yang memiliki daya tarik dan mampu menarik wisatawan dari berbagai negara. Semakin besarnya pengembangan yang dilakukan alhasil makin besar pula benefit yang hendak diperoleh baik bagi desa itu sendiri dan juga bagi masyarakat desa.

Namun dalam pengembangan obyek wisatanya, Desa Wisata Nongkosawit masih belum berkembang dibandingkan dengan Desa Wisata Kandri yang berdasarkan wawancara dengan Bapak Masduki selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Kandri dan selaku Ketua Klaster Pariwisata Kota Semarang menyampaikan bahwa saat ini Desa Wisata Kandri telah menjadi Desa Wisata Berkelanjutan dengan terus meningkatkan obyek wisatanya. Sedangkan Desa Wisata Wonolopo saat ini tengah mengembangkan potensi yang ada, salah satunya dengan pembuatan obyek wisata Kampoeng Flora dan Fauna pada bulan Desember 2022. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Warsono selaku ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kandang Gunung di Desa Wisata Nongkosawit menyampaikan bahwa sejak pandemi Covid-19 Desa Wisata Nongkosawit belum mampu mengembangkan potensi yang ada tidak seperti di desa-desa wisata lainnya yang ditetapkan dalam SK Walikota Semarang Nomor 556/407. Padahal Desa Wisata Nongkosawit memiliki obyek curug yang dapat dijadikan sebagai ikon wisata yang menarik bersama dengan keunikan lainnya yang dimiliki oleh Desa Wisata Nongkosawit. Untuk menjadikan Desa Wisata Nongkosawit menjadi wisata yang semakin memiliki daya tarik sehingga mengundang banyak pengunjung dari masyarakat lokal maupun dari mancanegara. Potensi yang ada di Desa Wisata Nongkosawit masih belum sepenuhnya terjemah sehingga pengembangan yang

dilakukan belum maksimal untuk dapat dijadikan sebagai wisata desa yang menarik dan mampu menjadikan desa dan masyarakatnya agar lebih sejahtera.

Menurut Gamal Suwanto (2004) pengembangan dari sebuah pariwisata biasanya dikaitkan bersama Sapta Pengembangan Kebijakan oleh pemerintah, dimana hal itu meliputi pada promosi, aksesibilitas, kawasan untuk pariwisata, produk wisata, wisata bahari, kampanye untuk menyampaikan sadar wisata bagi masyarakat. Untuk mengembangkan pariwisata diperlukan kebijakan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pariwisata yang telah direncanakan agar mampu memenuhi Sapta Pengembangan Kebijakannya. Oleh karena itu, kebijakan dari pemerintah diperlukan dalam rangka pengembangan desa wisata supaya program desa wisata itu mampu terus berjalan dan menjadi desa wisata yang maju sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Namun dalam implementasi kebijakan pengembangannya Desa Wisata Nongkosawit belum dapat sepenuhnya mengembangkan potensi yang ada di desa.

Kajian tentang implementasi kebijakan pengembangan desa wisata telah banyak diteliti para sarjana sebelumnya. Kajian penelitian yang sebelumnya yaitu dari Hanifa Pinasti Paramitha (2021), Angesti Nindya Cahyaningrum (2021), Alfonsus Lede Ghello (2021) yang membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan pada pengembangan desa wisata dalam rangka mewujudkan daya tarik desa wisata. Selain itu, membahas mengenai potensi yang ada di desa serta faktor penkung dan penghambat atau kendala yang dihadapi pada saat mengembangkan desa wisata. Sedangkan dalam penulisan yang peneliti akan lakukan tidak hanya sebatas mengenai implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Melainkan juga berfokus pada relasi antara para *stakeholder* termasuk masyarakat desa. Serta koordinasi yang terjadi antar *stakeholder* dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan desa wisata, khususnya setelah disahkannya Desa Wisata Nongkosawit melalui SK Walikota Semarang Nomor 556/407. Alhasil penelitian ini memiliki perbedaan terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang membuat penelitian ini menarik untuk dikaji. Dilihat dari segi latar belakang yang telah diuraikan penelitian ini menarik untuk dikaji bagaimana implementasi kebijakan dalam pengembangan desa wisata, dan juga bagaimana

relasi serta koordinasi antar stakeholder yang termasuk masyarakat tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan desa wisata yang masih belum berkembang tidak seperti desa-desa wisata lainnya. Berdasarkan hal itu penulis tertarik mengangkat tema ini untuk dikaji dalam bentuk skripsi yang penulis akan tulis.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas penjelasan yang disajikan di atas alhasil peneliti melakukan perumusan masalah yakni:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pada pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?
2. Bagaimana relasi antar *stakeholder* dalam mengimplementasikan kebijakan pada pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari perumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pada proses pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang
- b. Untuk mengidentifikasi relasi serta koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada pengembangan Desa Wisata Nongkosawit

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang diinginkan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, diharapkan pada penelitian ini nantinya mampu menjadi sarana untuk menambahkan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan dalam pengembangan desa wisata. Dan mampu dipakai selaku rujukan dan perbandingan untuk riset-riset mendatang.
- b. Manfaat praktis, dengan dilakukannya penelitian harapannya agar mampu menghasilkan manfaat untuk masyarakat serta seluruh pihak yang ikut terlibat dalam melaksanakan pengembangan suatu desa wisata, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan desa

wisata. Supaya potensi desa yang dikembangkan bisa terus berkembang menjadi yang lebih baik lagi.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai implementasi kebijakan pengembangan desa wisata telah dilakukan oleh banyak peneliti. Untuk itu, dari hasil kajian yang telah ditemukan oleh penulis pada tinjauan pustaka ini dibagi menjadi dua bagian yaitu implementasi kebijakan desa wisata dan pengembangan desa wisata. Beberapa tinjauan pustaka terkait implementasi kebijakan desa wisata dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Desa Wisata

Pada bagian implementasi kebijakan desa wisata terdapat jurnal penelitian yang ditulis oleh Ferry Aryanto Padabain dan Saptono Nugroho (2018) dengan penelitian yang berjudul *“Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali”*. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian yaitu untuk mengidentifikasi apa saja program kerja yang telah dirancang dan dikelola oleh Pokdarwis terutama pada sumber daya, pelestarian lingkungan, seni, adat budaya, dan juga pada promosi. Selain itu juga mengidentifikasi proses pelaksanaan program yang telah dirancang dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Metode kualitatif digunakan sebagai metode dalam menganalisis penelitian obyek yang diteliti. Pada penelitian ini menghasilkan implementasi program kerja sudah terlaksana dengan cukup baik yang melibatkan dukungan dari Poksarwis untuk pengelolaan dana bantuan. Tetapi pada inkonsistensi pengelola menjadi kendala karena pengelola bekerja tanpa dengan bayaran.

Selanjutnya adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Nurul Maulidiah dan Suci Megawati (2022) dengan penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pada BUMDes Sambimadu dalam pengembangan desa wisata yang melalui pembangunan agrowisata dengan menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dan kualitatif sebagai pendekatan. Hasil yang didapatkan dari

penelitian yaitu menunjukkan pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan desa wisata masih belum berjalan dengan baik karena belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten. Tetapi di sisi lain terdapat komunikasi yang baik anatar pemerintah desa dengan BUMDes dengan evlaluasi setiap minggunya.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Baehaqi dan Dhenas Rifqi Wirambara (2022) dengan penelitian yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan pada pembangunan desa wisata di Kabupaten Belitung Timur, serta bagaimana upaya yang dilakukan pada proses pembangunan desa wisata tersebut dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pada penelitian ini hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilaksanakan pada pengembangan desa wisata berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya seperti belum adanya akses jalan yang baik untuk menuju desa wisata dan belum tersedianya saluran air yang cukup.

Jurnal penelitian yang diteliti oleh Ismiyanto (2019) dengan judul penelitian "*Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara*". Tujuan dari penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan dana desa yang digunakan dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini mengkaji pada tiga desa yaitu Desa Kalilunjar, Desa Gentansari, dan Desa Giritirta dimana secara keseluruhan implementasi kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik. Namun, pada masing-masing aspek seperti komunikasi, sumber dya, disposisi, dan struktur birokrasi masih terdapat kekurangan.

Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Inayah Wulandari dan Maya Mustika Kartika Sari (2022) dengan penelitian yang berjudul "*Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di*

Desa Sekapuk Kabupaten Gresik". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan secara detail mendeskripsikan terkait pelaksanaan mekanisme partisipasi dari masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan desa wisata di desa tersebut. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa mekanisme partisipasi masyarakat yang dilaksanakan di Desa Wisata Setigi berjalan dengan kondisional dan bentuk keterlibatan masyarakat yaitu upaya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Mekanisme yang secara kondisional ini dilaksanakan dalam tiga mekanisme yaitu perencanaan ide, pelaksanaan ide, dan pengelolaan desa wisata.

Selanjutnya, pada bagaian yang kedua yaitu beberapa tinjauan pustaka lainnya yang terkait dengan pengembangan desa wisata dijelaskan sebagai berikut:

2. Pengembangan Desa Wisata

Pada bagian pengembangan desa wisata terdapat penelitian jurnal yang diteliti Dyah Istiyanti (2020) dengan judul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening*". Tujuan dari penelitian ini yaitu guna melakukan kajian terkait pelaksanaan pemberdayaan berdasarkan pengembangan desa wisata di Desa Sukawening, juga termasuk dari bentuk pemberdayaan masyarakat serta hasil yang diperoleh. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan hasil yang menunjukkan terdapat kegiatan yang mampu menunjang perkembangan desa wisata diantaranya yaitu perternakan kelinci, budidaya edamame, industri sepatu sandal, dan budidaya yang dilakukan tim Sarapala. Masyarakat turut berpartisipasi dalam pemberdayaan dengan program yang dilakukan berupa sosialisasi, inventarisasi potensi, dan pelatihan.

Kemudian penelitian skripsi yang dilakukan oleh Alfiatun Ni'mah (2019) yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Pada Kelompok Mina Sejahtera di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)*". Dalam penelitian tersebut tujuannya yaitu untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat dengan berdasarkan dari pengembangan desa wisata pada obyek penelitian beserta menganalisis dampak sosial serta ekonominya. metode kualitatif menjadi metode yang digunakan melalui penggunaan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dilakukannya riset ini yaitu pemberdayaan khalayak

dalam pengembangan desa ini dengan 3 tahap yang meliputi penyadaran, pengkapasitasan, pendayaan. Kemudian dampak bagi perekonomian yaitu akses ekonomi muda, pendapatan meningkat, kemudahan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Pada dampak sosialnya yaitu memiliki nilai baik dimata lingkungan sosial.

Selanjutnya yaitu penelitian skripsi yang diteliti oleh Ika Agustin (2020) dengan penelitian yang berjudul "*Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan strategi dan juga model pada pengembangan desa wisata di desa serang. Metode kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam pengembangan desa ni meliputi atraksi, promosi, akomodasi, analisis program, dan peyediaan fasilitas. Dengan tiga tahap pengembangan yaitu penyadaran dengan melakukan sosialisasi oleh BUMDes, pengkapasaitasan dengan melalui pelatihan oleh Disnaker dan Disporapar, pendayaan dengan pemberian modal.

Jurnal penelitian dilaksanakan oleh Ninik Wahyuning dan Maya Damayanti (2018) penelitian dengan judul "*Potensi Pengembangan Desa Kliwonan Sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen*". Tujuan dari penelitian yaitu mengkaji potensi pada pengembangan desa kliwonan yang merupakan desa wisata batik dengan menggunakan aspek kesediaan dan permintaan. Metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam menganalisis data pada penelitian. Adapun hasilnya yaitu desa kliwonan mempunyai potensi pengembangan batik, namun desa kliwonan belum siap karena terdapat aspek yang memerlukan perbaikan yaitu pada aksesibilitas, *amenity*, informasi, dan kelembagaan.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dinar Wahyuni (2018) dengan judul penelitian yaitu "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul*". Pada penelitian tersebut tujuan yang diharapkan yaitu untuk menganalisisi bagaimana strategi yang digunakan pada pemberdayaan masyarakat berdasarkan pengembangan desa wisata dengan menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif. Pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan dimana pemberdayaan dilakukan dengan tiga tahap yaitu kesadaran dengan sosialisasi dan inovasi yang dilakukan oleh Karang Taruna, pengkapsitasan dengan pelatihan dan pendampingan, kemudian pendayaan kepada masyarakat yang memiliki kapasitas. Desa Nglanggeran berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga jumlah wisatawan setiap tahunnya.

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Galuh Nefia Prameswari (2021) dengan penelitian yang berjudul "*Pengembangan Desa Wisata Taman Kaliyantar Mumbul Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Kaliyantar*". Penelitian tersebut bertujuan mengkaji pengembangan desa wisata pada Taman Kaliyantar Mumbul dengan pemberdayaan yang diusahakan oleh pemerintah setempat. Serta mengetahui penggunaan strategi oleh pemerintah desa dalam pengembangan wisata taman kaliyantar mumbul. Selain itu juga mengidentifikasi terkait faktor penghambat yang ada pada pengembangannya, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu pemerintah mempunyai peran cukup dominan dalam pengembangan wisata, dengan menyediakan modal yang bersumber dari dana APBDes. Masyarakat juga ikut serta dalam keberhasilan pengelolaan Taman Kaliyantar Mumbul yang menunjukkan bahwa Desa Kaliyantar menjadi salah satu desa yang maju dan mampu berdaya saing.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Safrilul Ulum dan Dewi Amanatun Suryani (2021) dengan penelitian yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong*". Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis model dan tingkat keterlibatan dari masyarakat setempat. Selain itu untuk mengkaji terkait pendukung dan juga kendala bagi masyarakat dalam keterlibatan pada pengembangan Desa Wisata Gamplong dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan. Dalam penelitian tersebut hasil yang ditunjukkan yaitu bahwa masyarakat setempat hanya ikut serta dalam keterlibatan tenaga dan harta benda serta ide atau gagasan. Namun dalam pengelolaannya, partisipasi masyarakat dinilai masih kurang.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Tri Indrianti, Lutfi Ariefianto, dan Dinar Halimi (2019) dengan penelitian yang berjudul "*Pemberdayaan*

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso". Pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Lombok Kulon dengan melalui pengembangan desa wisata organik, pada penelitian ini menggunakan metode jenis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian menunjukkan hasil dimana implementasi pada program pengembangan desa wisata dengan fokus pengelolaan fisik dan non fisik berhasil memperdayakan masyarakat. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga turut berpartisipasi dengan mendukung program yang ada.

Berdasarkan pada tinjauan penelitian yang sudah ada tersebut, maka diketahui bahwa penelitian yang saya lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dimana penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dalam pengembangan desa wisata dan faktor pendukung serta hambatan atau kendala yang dirasakan oleh pengelola dalam melaksanakan program kerja desa wisata. Selain itu juga mengkaji pada partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda baik pada tulisan pembahasan dan juga lokasi yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pengelola. Melainkan peneliti lebih berfokus untuk mengkaji mengenai bagaimana relasi antar *stakeholder* yang termasuk masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu juga mengkaji bagaimana koordinasi anatar para *stakeholder* tersebut dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, khususnya kebijakan setelah ditetapkannya Kelurahan Nongkosawit sebagai sebuah desa wisata melalui SK Walikota Semarang Nomor 556/407. Dengan demikian penelitian ini menarik untuk dikaji karena memiliki fokus berbeda dari penelitian yang telah dilakukan oleh sarjana-sarjana sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*Field Reserch*) digunakan dalam penelitian ini. Dimana pada jenis penelitian lapangan akan menelaah dengan intensif terkait latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial individu maupun kelompok, Ide penting dalam penelitian jenis ini yaitu peneliti melakukan peneletian secara langsung di lokasi penelitian untuk melaksanakan pengamatan langsung mengenai suatu fenomena yang terjadi (Bungin, 2013). Dengan kata lain penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan dengan masyarakat melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan alat lainnya yang termasuk data primer. Untuk memperoleh data primer dilakukan sendiri dengan data mentah-mentah yang bersumber dari obyek penelitian atau masyarakat langsung sehingga masih diperlukan analisis selanjutnya (Subagyo, 2006). Lokasi penelitian yang digunakan untuk obyek penelitian ini yaitu berada di Desa Wisata Nongksawit Kota Semarang. Untuk itu metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji rumusan masalah dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif sendiri merupakan proses mengumpulkan data dengan kondisi alamiah, sumber data yang primer, dan teknik mengumpulkan data yang lebih banyak berfokus pada observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi histori yang terkait (Sugiyono, 2011).

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan kegiatan dalam suatu penelitian yang diawali dari rumusan masalah hingga mnjadi sebuah kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sudi kasus, pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang penelitiannya berfokus pada eksplorasi kehidupan nyata, kasus atau berbagai kasus yang pengempulan data nya secara detail dan mendalam. Dalam pendekatan studi kasus ini menggunakan berbagai sumber informasi majemuk seperti observasi, wawancara, audio atau rekaman, dan dokumen-dokumen yang sesuai (Creswell, 2014). Keterkaitan antara pendekatan ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti mencoba mengidentifikasi implementasi kebijakan pengembangan di Desa Wisata Nongkosawit yang belum sepenuhnya berkembang. Dalam hal ini peneliti mengkaji secara nyata untuk mendapatkan data secara mendetail dengan

melibatkan sumber informasi majemuk. Sehingga mampu menyajikan data yang rinci untuk mengkaji perumusan masalah yang peneliti rancang sebelumnya.

2. Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun dan Effendi (2001) definisi konseptual diartikan sebagai pemaknaan dari konsep yang digunakan, tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam penggunaan konsep tersebut. Sehingga untuk memudahkan peneliti dalam penggunaan konsep pada penelitian ini perlu adanya definisi konseptual sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola suatu obyek yang menghasilkan bagi masyarakat.
- b. Pengembangan Desa Wisata merupakan pengembangan dari suatu desa menjadi sebuah desa wisata dengan destinasi pariwisata yang dipadukan dari daya tarik wisata alam dan budaya, serta layanan umum pariwisata. Daya tarik yang ada dengan melalui tata cara dan tradisi kehidupan sehari-hari masyarakat desa yang masih relatif asli dan unik sehingga tidak dimiliki oleh desa-desa lainnya.
- c. Relasi Kuasa merupakan hubungan yang terjalin diantara aktor-aktor tertentu yang mempunyai kepentingan dengan tingkat kekuasaannya masing-masing.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data dengan sumber yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lokasi obyek penelitian oleh peneliti itu sendiri, sehingga disebut sebagai data utama pada penelitian (Hasan, 2002). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan informan yang terkait dalam pengembangan desa wisata, kemudian observasi tempat yang menjadi fokus penelitian, serta dokumentasi terkait penelitian yang dikaji.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempunyai fungsi untuk membantu pada sumber data utama yang dikumpulkan oleh peneliti (Hasan, 2002). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dari dokumen kelurahan dan dinas pariwisata dan kebudayaan, foto kegiatan, arsip, serta penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini akan menggunakan beberapakan teknik pengumpulan data yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi ditunjukkan sebagai tsuatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati objek kajiannya agar dapat mengumpulkan data dari peristiwa yang terjadi. Pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan, panduan untuk pengamatan, dan alat perekam. Melalui Observasi akan mampu untuk menghasilkan data yang secara mendetail mengenai subjek ataupun objek yang diamati di lapangan. Objek yang ada dalam penelitian ini yaitu Desa Wisata Nongkosawit, dalam pengamatan ini peneliti bermaksud untuk berusaha mengumpulkan data secara detail dari Desa Wisata Nongkosawit.

b. Wawancara

Wawancara menjadi teknik salah satu teknik yang umum dilakukan oleh penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data. Menurut Moloeng (2005) Wawancara didefinisikan sebagai interaksi yang dilakukan atas dasar suatu tujuan, dimana interaksi ini dilaksanakan dengan dua belah pihak atau lebih yang terdiri dari pihak pertama yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua yang menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh pihak pertama. Sehingga teknik wawancara ini menjadi teknik yang tepat untuk digunakan dalam penelitian kualitatif agar mendapatkan data secara langsung dengan berinteraksi tatap muka bersama subjek yang menjadi kajian penelitian. Informan atau narasumber dari penelitian ini yaitu Dinas Kebudayaan dan Priwisata,

Ketua Pokdarwis Kandang Gunung di Desa Wisata Nongkosawit, Kelurahan Nongkosawit, serta beberapa masyarakat yang terkait.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung peneliti dalam menganalisis dokumen-dokumen pendukung mengenai objek yang sedang diteliti. Dokumen yang digunakan sebagai pendukung merupakan arsip-arsip terdahulu yang masih tersimpan dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung peneliti dalam menganalisis peristiwa atau kejadian yang dikaji dalam lokasi penelitian. Inti dari teknik dokumentasi ini yaitu teknik yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2013). Pada penelitian ini dokumen yang akan dikumpulkan yaitu berupa profil dai Desa Wisata Nongkosawit, bagan struktur pengelola atau Pokdarwis Kandang Gunung, kebijakan-kebijakan pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit, program pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit dan dokumentasi yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan mendapatkan data dari objek penelitian, kemudian menganalisis data yang telah didapatkan dengan memilih teori yang sesuai dan terkait dengan penelitian yang dikaji. Analisis data tersebut digunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam pembahasan yang selanjutnya dapat ditarik menjadi kesimpulan sesuai data yang secara rinci didapat dari lokasi onjek penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data dari (Miles dan Huberman) digunakan oleh peneliti, dimana pada model ini mempunyai tahapan-tahapan diantaranya yaitu:

1. Reduksi data

Tahap ini merupakan pelaksanaan menggabungkan data yang sudah didapatkan untuk menjadi suatu tulisan yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil data yang didapatkan melalui berbagai teknik seperti observasi, lalu wawancara, dokumentasi dan dari hasil yang lain kemudian menjadi suatu tulisan yang susunannya akan sesuai pada formatnya sendiri.

2. Penyajian data

Pada tahap berikut ini dilakukan proses analisa dari data yang telah digabungkan pada proses reduksi sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan pemecahan tema-tema agar menjadi bentuk yang lebih sederhana dan konkret menjadi subtema.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari proses pengakajian yang telah dilakukan pada obyek kajian yang telah diteliti. Tahap tersebut bermaksud untuk mengetahui hasil akhir dari analisis implementasi kebijakan pada pengembangan Desa Wisata Nongkosawit.

F. Sistematika Penulisan

Untuk membantu dalam susunan penulisan, penulis menyusun sistematika penulisan yang diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan nantinya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang merupakan alasan dilakukannya kajian dari obyek penelitian tersebut. Dari latar belakang tersebut kemudian menciptakan beberapa rumusan masalah yang juga dipaparkan tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, definisi teori dan konsep dari penelitian yang akan dikaji dan disusun secara sistematis.

BAB II KERANGKA TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Bab kerangka teori tersebut akan memaparkan mengenai teori tepat yang tepat untuk digunakan dalam mendukung analisis data penelitian yang akan dikaji. Pada penelitian ini, peneliti mengambil teoril model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang akan digunakan untuk menganalisis data-data di lapangan.

BAB III POTRET KOTA SEMARANG DAN DESA WISATA NONGKOSAWIT

Dalam bab III yang merupakan bab gambaran umum ini akan dijelaskan secara detail mengenai gambaran obyek penelitian yaitu Desa Wisata Nongkosawit yang lokasinya di Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan

Gunungpati, Kota Semarang merupakan lokasi penelitian. Gambaran umum yang akan dipaparkan tersebut meliputi profil desa, kondisi geografis, topografis, demografis, potensi desa, sosial budaya dan adat dari desa wisata yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA SK WALIKOTA SEMARANG NOMOR 556/407

Dalam bab IV ini akan memaparkan kebijakan-kebijakan yang dibentuk dalam rangka pengembangan desa wisata. Selain itu juga akan membahas mengenai proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor terkait serta masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit.

BAB V RELASI ANTAR STAKEHOLDER DESA WISATA

Dalam bab V ini akan menjelaskan relasi yang terjadi antar stakeholder dengan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Bab ini juga akan membahas terkait koordinasi yang dilakukan para aktor politik dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat tersebut.

BAB VI PENUTUP

Bab VI yang merupakan penutup ini akan menjelaskan terkait penarikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang dikaji yang tidak lain adalah asil dari rumusan masalah yang diajukan. Setelah itu akan dipaparkan saran dari penulis untuk pihak-pihak terkait ataupun untuk digunakan dalam penelitian dengan tema yang sama kedepannya.

BAB II

KERANGKA TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Berikut ini beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan berdasarkan relevansi pada judul penelitian.

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (Mustari, 2015).

Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan yang erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan saran dari masyarakat dengan ikut berdasarkan pada kepentingan umum. M. Irfan Islamy berpendapat bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat. Tetapi opini publik juga memiliki peran yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijakan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta berdasarkan pada kepentingan umum yang terkait, agar kebijakan yang dirumuskan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada. Terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yang dijelaskan oleh M. Irdan Islamy yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah

2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3. Bahwa kebijakan publik itu untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Thomas R. Dye juga berpendapat dalam "*Understanding Public Policy*", 1987 yang menyatakan bahwa *public policy* didefinisikan sebagai papun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever goverment chooses to do or not to do*). Isi public policy tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga pada apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah misalnya "mengatur konflik". Secara tegas *public policy* adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada hal tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Pengertian kebijakan publik tersebut diartikan sebagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan dengan berdasarkan pada kepentingan yang ada. Sehingga dalam perumusan kebijakan, pemerintah perlu untuk mendengarkan saran dari masyarakat serta melihat pada kepentingan yang ada agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan, melainkan sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur bukan berarti sudah terimplementasi secara baik. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut dengan kinerja dan pencapaian. Ada beberapa bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam menaati prosedur

dan SOP, keberhasilan dalam mencapai sasaran kebijakan yang dituju (Jumroh & Pratama, 2021).

Menurut Wahab (2002) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan yang baik secara konseptual dan dirumuskan melalui cara-cara yang demokratis dan melibatkan semua stakeholder hanya akan berupa kertas apabila tidak diimplementasikan dengan baik dan dilakukan melalui proses yang benar. Faktanya terdapat kebijakan publik baik yang dirumuskan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga lainnya yang ternyata belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan dari implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Meter dan Carl merupakan penekanan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan tersebut berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun kecil yang menjadi amanat dari keputusan kebijakan tersebut.

Hoogerwerf (1983:163) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan syarat-syarat pendukung pelaksanaan kebijakan diantaranya yaitu :

1. Isi Kebijakan

Suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika isi dari kebijakan tersebut jelas terkait tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara rinci, sarana dan penetapan program kebijakan sudah tersedia. Sebaliknya, jika isi dari suatu kebijakan bersifat samar, kabur, tidak secara terperinci baik pada sarana atau prioritas dan program kebijakan tidak ada maka akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Karena sifat kabur atau ketidakjelasan dari isi kebijakan

akan melonggarkan pegangan dan pedoman bagi aktor pelaksana kebijakan.

2. Tingkat Informasi Aktor-Aktor yang Terlibat

Dalam pelaksanaan kebijakan memperlihatkan keterlibatan dari para aktor secara langsung, sehingga para aktor tersebut perlu untuk memiliki informasi yang diperlukan guna menjalankan perannya dengan baik. Kurangnya informasi pada aktor objek kebijakan akan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, karena informasi kebijakan yang bersifat kabur dan kurang informatif bagi para aktor pelaksana.

3. Dukungan Bagi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan untuk menapai keberhasilan dalam pelaksanaannya, karena keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan akan sulit apabila tidak terdapat dukungan. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti saran dan juga biaya yang dapat menyokong aktor untuk melaksanakan kebijakan dengan berhasil.

4. Pembagian Potensi

Untuk dapat mensukseskan pelaksanaan kebijakan perlu untuk emebagi potensi dengan rata dan seimbang. Karena pembagian potensi yang tidak seimbang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pembagian potensi ini antara lain seperti perbedaan tugas, wewenang atau tanggung jawab, koordinasi pelaksanaan, dan sebagainya.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibentuk dan dirumuskan dengan kesepakatan dari berbagai aktor yang terlibat didalamnya. Implementasi menjadi hal yang penting dari seluruh proses kebijakan dengan melibatkan peran dari seluruh Stakeholder yang terlibat baik pemerintah maupun individu atau kelompok. Pelaksanaan kebijakan yang tidak dilakukan dengan baik untuk mencapai perubahan yang diinginkan maka hanya akan menjadi kebijakan diatas kertas

saja, karena tidak ada tujuan untuk mewujudkan kebijakan yang telah dibentuk tersebut.

C. Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Para ahli dan akademis mengemukakan berbagai pengertian mengenai implementasi, pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis obyek penelitian. Pada teori ini Grindle mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan dapat dilihat pada proses pencapaian hasil akhirnya, dimana diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Terdapat dua hal yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut yaitu:

1. Diukur dari prosesnya, keberhasilan diukur dengan mempertanyakan bagaimana pelaksanaan kebijakan dan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan merujuk terhadap pelaksanaan kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan yang ditentukan berhasil, terdapat dua faktor yang digunakan untuk mengukur tercapainya pelaksanaan kebijakan diantaranya yaitu dampak yang terjadi pada masyarakat baik individu maupun kelompok. Selain itu pada tingkat perubahan yang telah terjadi dan tingkat penerimaan kelompok yang dituju, serta perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut.

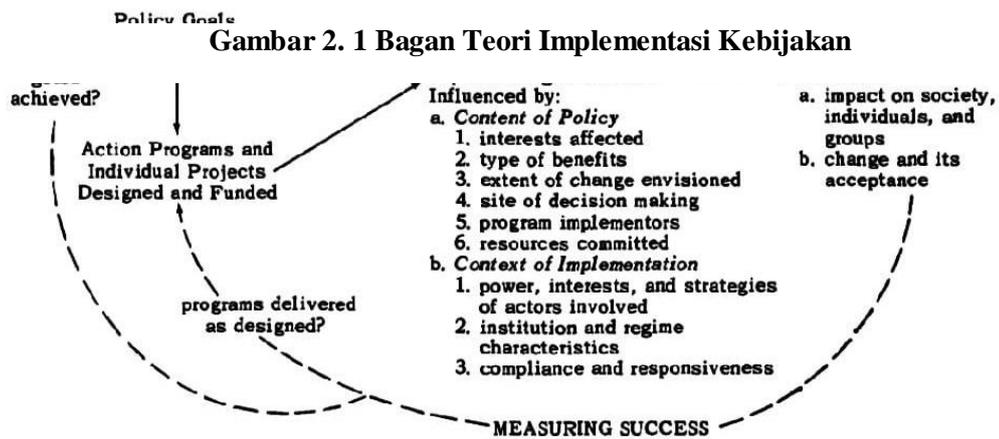
Selain itu, tercapainya suatu kebijakan juga ditentukan oleh tingkat pelaksanaan kebijakan tersebut yang diantaranya terdiri dari:

- a. Isi kebijakan (*Content of Policy*), pada isi kebijakan ini mencakup :
 1. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*) dimana hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan
 2. Tipe manfaat (*Type of Benefits*) yang pada hal ini isi kebijakan berusaha untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang ada harus memiliki beberapa jenis manfaat yang menunjukkan adanya dampak positif

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Envision*) dimana pada setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga isi kebijakan yang ingin dijelaskan harus memiliki skala yang rinci
 4. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*) dalam suatu kebijakan pengambilan keputusan memiliki peran yang sangat penting untuk pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat melihat apakah letak program tersebut sudah tepat atau belum
 5. Pelaksanaan program (*Program Implementer*) dalam menjalankan suatu program harus secara kompeten untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut
 6. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*) dimana pada hal ini mengukur apakah suatu program tersebut telah didukung dengan sumber daya yang memadai, karena dalam pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daa yang memadai agar pelaksanaan tersebut mamapu berjalan dengan baik.
- b. Lingkungan implementasi (*Contet of Implementation*), pada lingkungan implementasi ini mencakup :
1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*) dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentunya perlu mempertimbangkan kekuatan dan juga kekuasaan, strategi yang digunakan untuk kepentingan aktor politik dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan guna untuk memperlancar jalannya kebijakan karena aktor politik terlibat langsung pada pelaksanaan tersebut
 2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regine Characteristic*) karakteritik lembaga sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan karena hal itu mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan, selain itu lingkungan juga menjadi hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan
 3. Kepatuhan dan respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*) dalam hal ini dilihat mengenai sejauh mana tingkat

kepatuhan dan juga respon dari aktor politik dalam melaksanakan kebijakan.

Dari dua tingkat pelaksanaan kebijakan tersebut, peneliti menggunakan Isi Kebijakan (*Content of Policy*) untuk menjawab pada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Kemudian pada rumusan masalah yang kedua yaitu terkait bagaimana relasi antar *stakeholder* dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, peneliti menggunakan tingkat pelaksanaan kebijakan yang disebut lingkungan implementasi (*Context of Implementation*). Sehingga dalam hal ini teori implementasi kebijakan dari Grindle sesuai dengan fokus penelitian ini. Bagan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle sebagai berikut:



Sumber : Grindle, 1980

BAB III

POTRET KOTA SEMARANG DAN DESA WISATA NONGKOSAWIT

A. Potret Umum Kota Semarang

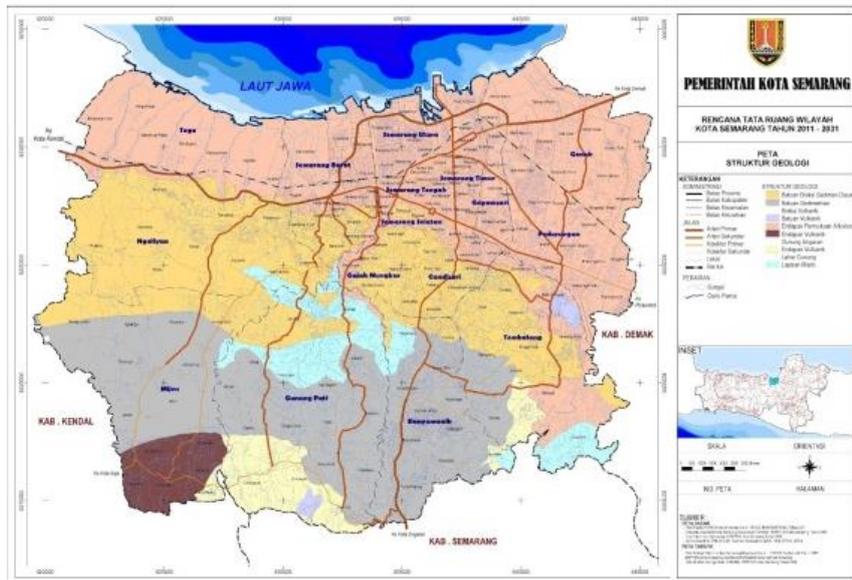
1. Potret Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah dengan kedudukan kota yang strategis karena berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Kota Semarang memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 373,70 km² dan luas wilayah tersebut merupakan 1,5% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah timur : Kabupaten Demak
- Sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah utara : Laut Jawa

Secara topografi terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Pada daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2-15%, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15-40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40(>40%). Sesuai dengan letak geografisnya, Kota Semarang dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April-September dan musim penghujan pada bulan antara Oktober-Maret. Curah hujan tahunan di Kota Semarang rata-rata sebesar 2,790 mm, suhu udara berkisar antara 23 derajat celcius sampai dengan 34 derajat celcius dengan kelembapan udara 77% rata-rata pertahunnya.

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Semarang



(Sumber: Bappeda Kota Semarang)

2. Potret Demografis Kota Semarang

Kota Semarang berdasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistika Kota Semarang pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk mencapai 1.656.564 jiwa. Posisi Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan pantai dan wilayahnya yang luas menjadikan terdapat beragam suku, etnis, agama, dan ras di Kota Semarang. Keberagaman etnis masyarakat di Kota Semarang seperti etnis Jawa, Tionghoa, dan lainnya. Agama yang dianut oleh masyarakat Kota Semarang juga beragam, terdapat penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong HU Chu dengan mayoritas masyarakat yang menganut agama islam.

Keberagaman masyarakat yang terdapat di Kota Semarang sesuai dengan jumlah penduduknya yang besar dengan wilayah yang luas dan terbagi menjadi Semarang Tengah, SemarangTimur, Semarang Selatan, Semarang Utara, dan Semarang Barat dengan kecamatan yang berjumlah 16 serta kelurahan yang jumlahnya ada 117. Secara rinci jumlah kelurahan dan luas wilayah di masing-masing kecamatan di Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Mijen	14	57.55
2	Gunungpati	16	54.11
3	Banyumanik	11	25.69
4	Gajah Mungkur	8	9.07
5	Semarang Selatan	10	5.928
6	Candisari	7	6.54
7	Tembalang	12	44.2
8	Pedurungan	12	20.72
9	Genuk	13	27.39
10	Gayamsari	7	6.177
11	Semarang Timur	10	7.7
12	Semarang Utara	9	10.97
13	Semarang Tengah	15	6.14
14	Semarang Barat	16	21.74
15	Tugu	7	31.78
16	Ngaliyan	10	37.99
	Kota Semarang	177	373.7

(Sumber: BPS Kota Semarang)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, Kecamatan Gunungpati menjadi kecamatan dengan wilayah terluas kedua setelah Kecamatan Mijen dengan luas wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar 54.11 km² dan Kecamatan Mijen 57.55 km². Sebagai kecamatan dengan wilayah yang terbilang luas dan jenis tanah yang cocok untuk tempat menanam buah-buah dan sebagainya. Kecamatan Gunungpati memiliki berbagai daya tarik potensi alam yang dijadikan sebagai wisata, baik pada obyek alamnya maupun pada kulinernya yang khas. Untuk itu di Kecamatan Gunungpati terdapat berbagai wisata di berbagai kelurahannya, salah satunya yaitu Desa Wisata Nongkosawit yang menjadi fokus pada penelitian ini. Desa Wisata Nongkosawit menjadi tempat tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi dengan berbagai obyek wisatanya yang berbeda dengan daerah lainnya.

3. Potret Sosial Politik dan Ekonomi Kota Semarang

a. Potret Sosial Politik

Kota Semarang memiliki kawasan strategis sosial budaya yang merujuk pada wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam bidang sosial budaya. Pengembangan kawasan strategis ini berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Kawasan strategis sosial budaya ini salah satunya yaitu Masjid Agung Semarang atau disebut Masjid Agung Kauman, dimana masjid ini memiliki nilai sosial budaya karena budaya sejarahnya yang berdiri dari tahun 1575. Sekain itu, Masjid Agung Jawa Tengah juga menjadi salah satu kawasan strategis sosial budaya di Kota Semarang dengan sejarah berdirinya Masjid Agung tersebut. Masjid Agung ini didirikan pada tahun 2002 dan beroperasi pada tahun 2006, masjid ini memiliki keistimewaan pada gaya arsitekturnya yang merupakan gabungan dari 3 gaya arsitektur. Sehingga hal ini juga mendorong pengembangan potensi sosial budaya di Kota Semarang. (Bappeda, 2021)

Kawasan strategis yang mendukung pengembangan sosial budaya terkait pendidikan di Kota Semarang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu berada di kawasan Kecamatan Tembalang dan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati memiliki perguruan tinggi besar seperti Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Kecamatan Tembalang dengan perguruan tinnginya yaitu Universiras Diponeoro (UNDIP). Adanya pusat pendidikan ini menjadi pilar untuk mendorong pengembangan kawasan strategis sosial budaya di Kota Semarang, karena dengan adanya pusat pendidikan tersebut akan menjadikan adanya gaya hidup baru disekitar kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas pendidikan. (Bappeda, 2021)

Kawasan sosial budaya lainnya yaitu Kawasan Gedong Batu atau biasa disebut Sam Poo Kong yang saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Tionghoa.

Keindahan arsitektur yang ada di Kawasan Sam Po Kong memiliki nilai sejarah yang menarik bagi wisatawan. Selain sebagai tempat ibadah, Kawasan Sam Po Kong juga menjadi salah satu pariwisata di Kota Semarang yang memiliki akulturasi budaya Islam dan Tionghoa karena pendiri Sam Po Kong yang menganut agama Islam. Sehingga hal ini berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat di Kota Semarang dan menjadi pengembangan kawasan strategis sosial budaya. Sama halnya dengan Kawasan Kota Lama yang turut menjadi kawasan sosial budaya dengan gaya arsitektur Belanda yang memiliki ciri khas pada setiap bangunannya. Kreativitas dalam menonjolkan arsitektur yang unik dan menarik menjadi salah satu bentuk pengembangan ekonomi kreatif yang nantinya juga akan turut berpengaruh pada sosial budaya di sekitar Kawasan Kota Lama. (Bappeda, 2021)

Pada kondisi politik di Kota Semarang, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang aktif ikut serta dalam kegiatan politik menurut partai politik pada tahun 2022 yaitu ada 50 orang. Terdapat partai politik Partai Demokrasi Perjuangan yaitu sebanyak 14 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kemudian ada partai Gerakan Indonesia Raya dengan 6 orang yang berjenis kelamin laki-laki, Partai Demokrat memiliki 6 orang anggota yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 orang anggota yang merupakan laki-laki, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 4 orang anggota yang berjenis kelamin laki-laki, Partai Amanat Nasional dengan 2 orang anggota yang merupakan 1 orang perempuan dan 1 laki-laki, Partai Solidaritas Indonesia terdapat 2 orang anggota yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan, Partai Golongan Karya dengan 3 orang anggota yang merupakan laki-laki, partai Nasional Demokrat dengan 2 anggota yang berjenis kelamin laki-laki. (BPS Kota Semarang, 2023)

Berdasarkan pada data jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, Kota Semarang terdapat 9 partai politik yang turut dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan jumlah anggotanya yaitu 50 orang yang terdiri dari 41 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi salah satu hal nyata perempuan saat ini sudah turut andil dalam bidang politik di Kota Semarang. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Kota Semarang memberikan hak bagi perempuan untuk turut andil dalam politik yang ada dengan keikutsertaannya dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kota Semarang sendiri saat ini dipimpin oleh seorang Walikota yang bernama Hevearita Gunaryati Rahayu yang mulai menjabat sebagai Walikota pada Tahun 2023.

b. Potret Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang mengalami peningkatan pada Tahun 2022, dimana berdasarkan hasil perhitungan sangat sementara angka PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Semarang Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 5,73 persen. Dalam peningkatan pertumbuhan ini, Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Kota Semarang Tahun 2022 senilai 28,85 persen. Sektor terbesar kedua adalah sektor Konstruksi dan sektor terbesar ketiga yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai kontribusi masing-masing 26,30 persen dan 13,18 persen. Pada Interpretasi Nilai Indeks harga implisit lebih dari 100 yang menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan periode tahun dasar. Pada tahun 2022 nilai indeks implisit PDRB Kota Semarang yaitu 148,77 persen dengan tahun dasar

2010. Dalam hal ini artinya terdapat kenaikan harga sebesar 48,77 persen dari tahun dasar 2010. (BPS Kota Semarang, 2023)

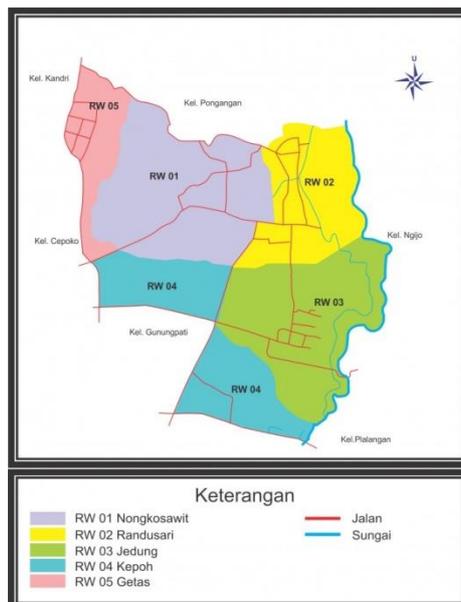
B. Potret Umum Desa/Kelurahan Wisata Nongkosawit

1. Potret Geografis Desa/Kelurahan Wisata Nongkosawit

Desa/Kelurahan Nongkosawit merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 240.756 Ha yang terdiri dari 102.046 Ha merupakan tanah sawah, 54.320 Ha merupakan tanah pekarangan atau bangunan, dan 1.695 Ha merupakan tanah keperluan fasilitas umum. Desa/Kelurahan Nongkosawit terbagi atas 5 RW dan 25 RT, masing-masing RW tersebut memiliki namanya tersendiri dimana RW 1 bernama Nongkosawit, RW 2 Randusari, RW 3 Jedung, RW 4 Kepoh, RW 5 Getas. Batas wilayah administratif dari Desa/Kelurahan Nongkosawit yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kelurahan Cepoko
- Sebelah Utara : Kelurahan Pongangan
- Sebelah Timur : Kelurahan Ngijo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Gunungpati

Gambar 3. 2 Peta Administratif Desa/Kelurahan Nongkosawit



(Sumber: Website Kelurahan Nongkosawit)

2. Potret Kependudukan dan Keagamaan Desa/Kelurahan Nongkosawit

Desa/Kelurahan Nongkosawit merupakan desa atau kelurahan dengan penduduk yang berjumlah 5833 jiwa. Berdasarkan total jumlah penduduk tersebut terdapat 1961 Kepala Keluarga yang terdiri dari 2877 penduduk laki-laki dan 2956 penduduk perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki nya, dimana kemudia jumlah penduduk tersebut dikategorikan berdasarkan umurnya sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tabel Penduduk Menurut Kelompok Usia Pada Tahun 2022

No	Usia (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	0-4	302
2	5-9	409
3	10-14	453
4	15-19	447
5	20-24	457
6	25-29	430
7	30-34	439
8	35-39	428
9	40-keatas	2531

(Sumber: Kelurahan Nongkosawit)

Pada potret sosial keagamaan di Desa/Kelurahan Nongkosawit, masyarakat Nongkosawit mayoritas beragama Islam dengan jumlah pemeluk agama Islam yaitu terdapat 5813 orang. Selain itu, terdapat masyarakat beragama Khatolik sejumlah 28 orang, beragama Protestan 50 orang, dan 5 orang beragama Konghucu. Terkait jumlah sarana ibadah di Nongkosawit terdapat Masjid yang berjumlah 9 buah dan Mushola/Langgar berjumlah 21 buah, untuk sarana ibadah agama lainnya berada di luar Desa/Kelurahan Nongkosawit.

3. Potret Pendidikan Desa/Kelurahan Nongkosawit

Pendidikan menjadi hal yang penting bagi masyarakat Desa/Kelurahan Nongkosawit, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang cukup baik. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal saja, masyarakat juga memperhatikan pada pendidikan non formal dan pelatihan ketrampilannya. Hal tersebut bertujuan untuk menambah daya mampu masyarakat terhadap ketrampilan yang mereka miliki agar nantinya dapat digunakan sebagai salah satu peluang kewirasahaan. Tingkat pendidikan masyarakat Nongkosawit tersebut terlihat pada data jumlah penduduk menurut pendidikan Desa/Kelurahan Nongkosawit sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Pada Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	302
2	Tidak Tamat SD	1162
3	Tamat SD/ sederajat	504
4	Tamat SLTP/ sederajat	878
5	Tamat SLTA/ sederajat	1363
6	Tamat akademi/ sederajat	130
7	Tamat Perguruan Tinggi/ sederajat	338

(Sumber: Kelurahan Nongkosawit)

Untuk menunjang pendidikan di Desa/Kelurahan Nongkosawit, terdapat sarana pendidikan yang berada di Nongkosawit. Tujuannya agar pendidikan masyarakat Nongkosawit semakin baik dengan didukung adanya sarana pendidikan yang memadai. Sarana pendidikan di Nongkosawit diantaranya yaitu terdapat 2 buah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2 buah Taman Kanak-kanak (TK), 2 buah Sekolah Dasar Negeri, 1 buah Madrasah Ibtidaiyah, 1 buah SLTP Negeri, 1 buah SLTP Swasta, 1 buah Perguruan Tinggi Swasta. Selain sarana pendidikan formal tersebut, terdapat juga pendidikan non formal yang diantaranya yaitu ada 3 buah pondok pesantren dan 5 buah Majelis Taklim.

4. Potret Perekonomian Desa/Kelurahan Nongkosawit

Kondisi bentang alam Desa/Kelurahan Nongkosawit yang berbukit dengan berada di dataran tinggi menjadikan iklim di Nongkosawit menjadi sejuk. Jenis tanah yang cokelat merah dan berstektur yang menjadikan Nongkosawit cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Sehingga pertanian dan perkebunan menjadi salah satu penyangga perekonomian dari masyarakat Nongkosawit. Berdasarkan pada data dari Kelurahan Nongkosawit terdapat 186 orang petani yang memiliki tanah pertanian, kemudian petani yang tidak memiliki tanah bekerja sebagai penggarap tanah dan buruh tani dengan total terdapat 265 orang petani penggarap tanah dan 181 orang buruh tani. Tanaman yang dihasilkan dengan kondisi tanah dan iklim yang mendukung menjadikan hasil tanaman yang diperolehpun beragam seperti kacang kedelai, kacang tanah, padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, cabe, tomat, terong, dan lain sebagainya. Selain itu, pada sektor perkebunannya Desa/Kelurahan Nongkosawit menghasilkan berbagai jenis buah-bahan seperti mangga, rambuta, jambu biji, jambu air, jeruk, durian, pepaya, nangka, dan buah-buahan lainnya.

Perekonomian masyarakat Nongkosawit lainnya yaitu terdapat di sektor peternakan dan perikanan, dengan lahan dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membudidayakan ternak dan ikan. Adapun populasi ternak dan jumlah pemilik yang terdapat di Nongkosawit yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Jumlah Peternakan Pada Tahun 2022

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)	Pemilik Ternak (orang)
1	Sapi perah	135	50
2	Sapi biasa	90	22
3	Kambing	233	42
4	Domba	35	8
5	Ayam	80	9
6	Itik	314	9

7	Peternakan lainnya	112	1
---	--------------------	-----	---

(Sumber: Kelurahan Nongkosawit)

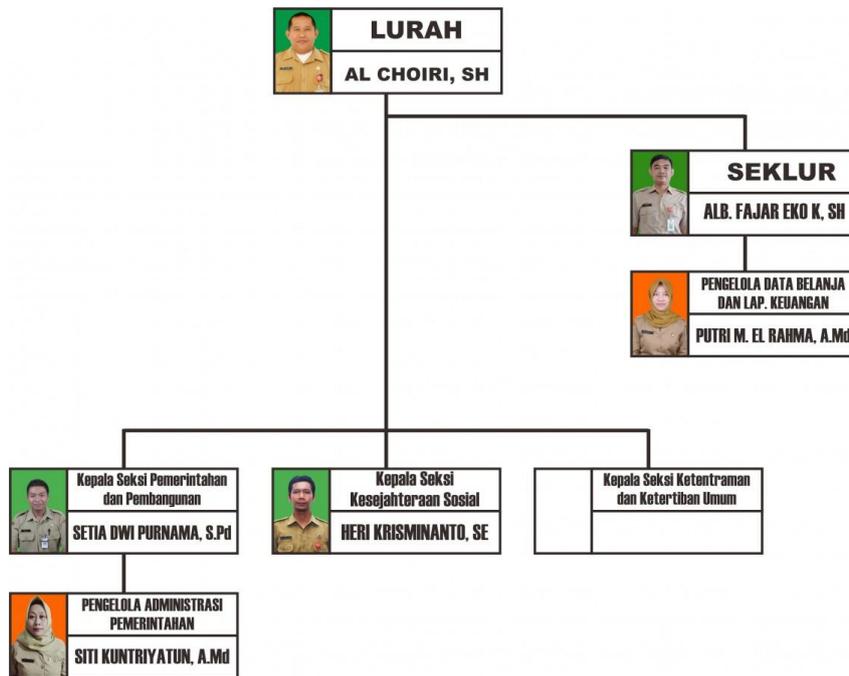
Perekonomian masyarakat Nongkosawit yang penyangga utamanya merupakan pertanian, perkebunan dan peternakan dapat dijadikan sebagai penunjang bagi pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Saat ini peternakan dan pertanian menjadi hal yang sulit untuk dijumpai, sehingga dengan adanya peternakan dan pertanian di Nongkosawit ini menjadi peluang sebagai wisata edukasi yang sangat menarik.

Selain bertani, berkebun, dan berternak terdapat masyarakat Nongkosawit yang mata pencahariannya sebagai buruh, pedagang, pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ABRI. Terdapat 367 orang yang bekerja sebagai buruh industri, 45 orang sebagai buruh bangunan, 29 orang sebagai pedagang, 12 orang sebagai pengangkutan, 136 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 18 orang sebagai ABRI. Terdapat juga masyarakat Nongkosawit yang mata pencahariannya sebagai pengrajin ketrampilan seperti tukang kayu, tukang jahit, dan tukang besi yang juga dapat digunakan sebagai penunjang bagi desa wisata.

5. Potret Kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan Nongkosawit

Lembaga pemerintahan Nongkosawit termasuk dalam kategori Kelurahan yang berada pada lingkup Kota Semarang. Sehingga dalam hal ini Nongkosawit dipimpin oleh seorang Lurah dengan dibantu oleh aparat desa di Kelurahan. Jumlah total aparat pemerintahan Kelurahan Nongkosawit berjumlah 6 orang yang diantaranya yaitu Lurah, Sekretaris Lurah dan 1 staf di bawahnya sebagai pengelola data belanja dan laporan keuangan, kasi pemerintahan dan pembangunan dengan 1 staf sebagai pengelola administrasi pemerintahan, kasi kesejahteraan sosial, sedangkan pada posisi kasi ketentraman dan ketertiban umum tidak terisi. Berdasarkan dari data lembaga pemerintahan Desa/Kelurahan Nongkosawit tersebut, berikut ini struktur organisasi pemerintah Desa/Kelurahan Nongkosawit:

Gambar 3. 3 Struskturn Organisasi Kelurahan Nongkosawit



(Sumber: Website Kelurahan Nongkosawit)

C. Potret Pokdarwis dan Desa Wisata Nongkosawit

1. Potret Pokdrwis Kandang Gunung

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai salah satu pengelola desa wisata menjadi hal yang penting untuk pengembangan desa wisata. Pada Desa Wisata Nongkosawit sendiri memiliki Pokdarwis dengan nama Pokdarwis Kandang Gunung. Pokdarwis Kandang Gunung merupakan kelompok masyarakat yang sadar akan potensi wisata yang terdapat di Desa Wisata Nongkosawit. Anggota Pokdarwis Kandang Gunung berjumlah kurang lebih 50 orang dengan susunan organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggota dengan susunan organisasi Pokdarwis Kandang Gunung sebagai berikut:

POKDARWIS KANDANG GUNUNG

- Ketua** : Suwarsono, S.P
- Sekretaris** : Wulan
- Bendahara** : Farida Indrastutu, Spd

Seksi Pemandu Wisata	: Rohmat
Seksi Humas	: Agus Sumanto
Seksi Homestay	: Endang
Seksi Kebun Jgung	: Joni Suranto
Seksi Kebun Durian	: Hj. Suhardi
Seksi Peternakan	: Nur Azis
Seksi Pertanian	: Suparmin
Seksi Wisata Alam	: Rohmat
Seksi Alat Musik Gamelan	: Harjo
Seksi Kuliner	: Ari dan Wati
Seksi Pemancingan	: Kasih, Spd
Seksi Joglo Java Villa	: Febrianti

Pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit oleh Pokdarwis Kandang Gunung bertujuan agar Desa/Kelurahan Nongkosawit yang memiliki potensi wisata dengan kondisi alamnya yang masih relatif asli ini dapat menjadi wisata yang menarik dan banyak diminati oleh wisatawan. Kemudian dari Desa Wisata Nongkosawit ini dapat memberikan manfaat dan hasil yang baik bagi masyarakat dan menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat Nongkosawit. Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit ini didukung dengan pola kehidupan sehari-hari masyarakat Nongkosawit yang terbilang unik dengan masih memelihara adat dan budaya yang sejak dulu melekat di masyarakat Nongkosawit.

2. Potret Potensi Desa Wisata Nongkosawit

Desa Wisata Nongkosawit meliputi 5 RW yang ada di Nongkosawit, dimana RW 1 yang merupakan kampung Nongkosawit dijadikan sebagai pengembangan agrowisata dan budaya seni nya yang didukung dengan adanya pegiat budaya dan pengembangan Wayang Ringut di kampung tersebut. Pada RW 2 yaitu kampung Randusari dijadikan sebagai pengembangan agrowisata dan wisata alamnya, dimana di kampung Randusari ini masih terdapat monyet ekor panjang dan Curug atau Air Terjun Mah Tukung yang menjadi objek terkenalnya. RW 3 kampung Jedung dikembangkan dengan wisata alam dan perkebunannya, hal ini

didukung dengan adanya pintu air Sungai Kripik dan juga terdapat perkebunan mrica serta perkebunan durian di kampung Jedung tersebut.

Selanjutnya pada RW 4 kampung Kepoh terdapat sawah loh yang bernama Tuk Jemblong, sawah loh sendiri memiliki arti sawah yang tidak pernah kering saat musim kemarau ataupun musim hujan. Pada kampung Kepoh juga terdapat rumah joglo yang digunakan sebagai penginapan bagi para wisatawan yang berkunjung dan ingin menginap, rumah joglo tersebut merupakan kepemilikan pribadi warga dan dikelola secara pribadi. RW 5 kampung Getas yang merupakan kampung tematik dengan sebutan kampung Osin (Olahan Singkong) menjadi wisata kuliner bagi Desa Wisata Nongkosawit. Terdapat banyak warga yang membuat aneka jajanan pasaran yang terbuat dari bahan singkong sehingga kampung Getas ini cocok sebagai pengembangan obyek wisata kuliner Desa Wisata Nongkosawit. Beragam wisata lain yang terdapat di Desa Wisata Nongkosawit antara lain yaitu:

1. Omah Pang

Omah Pang merupakan rumah yang terbuat dari ranting phon jati, pembangunan Omah Pang ini sebagai salah satu upaya untuk memanfaatkan limbah ranting yang ada di Desa Wisata Nongkosawit karena di Nongkosawit masih terdapat banyak pepohon di daerahnya. Sehingga upaya pemanfaatan limbah ranting ini dilakukan untuk membuat Omah Pang, Omah Pang dijadikan sebagai tempat taman belajar, tempat berdiskusi, kegiatan masyarakat lainnya, dan sebagai spot foto.

Gambar 3. 4 Omah Pang



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

2. Wayang Ringut

Wayang Ringut merupakan wayang yang bahan baku pembuatannya dari limbah sisa kerajinan bambu yang kemudian menjadi ide bagi Pokdarwis Kandang Gunung untuk dijadikan sebagai wayang. Wayang Ringut juga dipentaskan dengan menceritakan cerita leluhur.

Gambar 3. 5 Wayang Ringut



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3. 6 Pagelaran Wayang Ringut



(Sumber: Youtube : omahpang channel)

3. Wedang Rojo

Wedang Rojo adalah minuman yang memiliki warna merah, dimana warna merah ini dihasilkan dari rempah secang tua. Selain secang tua, terdapat juga rempah lain didalamnya seperti sereh, daun jeruk, cengkeh, dan kapulaga.

Gambar 3. 7 Wedang Rojo



(Sumber: Pokdarwis Kandang Gunung)

4. Aksesoris Jenetri

Aksesoris jenetri merupakan aksesoris yang terbuat dari biji jenetri yang berjatuhan, hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan limbah menjadi karya kreatif yang memiliki nilai jual. Aksesoris dari biji jenetri ini berkhasiat untuk kesehatan seperti meningkatkan kinerja jantung, menjaga kesehatan paru-paru, meredakan stress dan kecemasan, serta manfaat lainnya bagi kesehatan. Desa Wisata Nongkosawit mengubah

biji jenetri menjadi aksesoris seperti gelang, kalung, tasbih yang bernilai jual dan menjadi aksesoris khas dari Nongkosawit.

Gambar 3. 8 Aksesoris Jenetri



(Sumber: Youtube: omahpang channel)

5. Wisata Ternak

Desa Wisata Nongkosawit memiliki berbagai macam wisata yang ditawarkan, salah satunya yaitu wisata ternak yang bertujuan untuk mengedukasi pengunjung tentang memelihara ternak. Pengunjung dapat secara langsung memberi makan ternak dan belajar tentang perkembangan peternakan. Ternak yang terdapat di Desa Wisata Nongkosawit yaitu terdiri dari ternak sapi, kambing, dan ayam. Peternakan tersebut merupakan milik pribadi warga Nongkosawit yang kemudian dijadikan peluang menjadi wisata.

Gambar 3. 9 Peternakan Sapi



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3. 10 Peternakan Kambing



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

6. Wisata Sendang

Sendang merupakan tempat sumber mata air yang terus mengalir, pada jaman dahulu sendang dijadikan sebagai sumber air untuk kebutuhan mandi dan mencuci bagi warga. Sehingga sendang menjadi tempat yang unik karena tidak dimiliki oleh semua daerah, di Desa Wisata Nongkosawit sendiri sendang yang dimiliki disebut dengan nama Sendang Cilik atau sendang kecil.

Gambar 3. 11 Sendang Cilik



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

7. Wisata Air Terjun atau Curug Mah Tukung

Curug Mah Tukung berada pada RW 2 Randusari di Desa Wisata Nongkosawit. Curug ini menjadi destinasi wisata alam yang menarik karena selain melihat keindahan dari curug tersebut, pengunjung juga

bisa hiking dan merasakan kesegaran air pada curug. Namun saat ini potensi curug ini masih belum dapat berkembang dengan baik, dimana trek hiking yang sudah direncanakan belum dapat terealisasi.

Gambar 3. 12 Curug atau Air Terjun Mah Tukung



(Sumber: Youtube: omahpang channel)

8. Tari Kuntulan

Tari Kuntulan merupakan tarian khas dari Desa/Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati. Tari Kuntulan ini digunakan sebagai *welcome dance* untuk menyambut dan menghibur pengunjung yang datang berwisata di Desa Wisata Nongkosawit.

Gambar 3. 13 Tari Kuntulan



(Sumber: Youtube: omahpang channel)

9. Taman Baca Digital

Taman Baca Digital ini menjadi spot wisata edukasi yang menarik, karena tempat membaca didesain dengan keindahan alam yang alami.

Gambar 3. 14 Taman Baca Digital



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

10. Kuliner Olahan Singkong

Olahan makanan atau cemilan berbahan dari singkong ini merupakan kuliner khas dari Desa Wisata Nongkosawit, terutama di RW 5 Getas yang merupakan kampung tematik dengan sebutan kampung Osin (Olahan Singkong). RW 5 Getas di Nongkosawit ini merupakan sentra pembuatan olahan makanan berbahan singkong, hal ini karena dari dulu warga RW 5 Getas banyak yang berprofesi sebagai pembuat dan penjual olahan dari bahan singkong ini. Nongkosawit juga masih memiliki banyak tanaman singkong yang menjadikan pengolahan kuliner dari bahan singkong ini masih terus berjalan. Makanan dari bahan singkong yang dibuat ini bervariasi seperti tape singkong, cenil, getuk lindri, getuk goreng, dan olahan singkong lainnya.

Gambar 3. 15 Makanan Olahan Singkong



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3. 16 Tanaman Singkong RW 5 Getas



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dari banyaknya wisata tersebut, Desa Wisata Nongosawit masih memiliki beragam obyek wisata baik yang sudah terealisasi maupun yang hingga saat ini belum dapat terealisasi. Desa Wisata Nongkosawit juga memiliki maskot sebagai ciri khas dari desa wisatanya dan gerbang masuk yang bertuliskan Desa Wisata Nongkosawit untuk memudahkan pengunjung ysng datang.

Gambar 3. 17 Maskot Desa Wisata Nongkosawit



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3. 18 Gerbang Masuk Desa Wisata Nongkosawit



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA SK WALIKOTA SEMARANG NOMOR 556/407

A. Awal Pembentukan Desa Wisata Nongkosawit

Dalam implementasi kebijakan Desa Wisata yang mengusung sebuah desa sebagai desa wisata, memerlukan asal dari desa tersebut hingga menjadi sebuah desa wisata. Untuk itu dalam peneliti menganalisis awal pembentukan dari Kelurahan Nongkosawit menjadi Desa Wisata Nongkosawit. Desa sendiri merupakan perwujudan dari kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, dan juga kultural yang dimiliki oleh suatu daerah dengan adanya hubungan saling timbal balik antara daerah satu dengan yang lainnya (R. Bintarto, 2020). Desa sebagai bentuk pemerintahan yang paling dasar menjadikan kondisi sosial maupun ekonomi masyarakatnya tidak mencapai taraf sejahtera. Hal itu juga dirasakan oleh masyarakat Nongkosawit, masyarakat merasak kondisi ekonomi mereka dalam tingkat kemiskinan. Berdasarkan keadaan tersebut kemudian apratur Desa/Kelurahan Nongkosawit melakukan perubahan dengan memotivasi dan mengajak masyarakat Nongkosawit agar bersama-sama menjadi desa mandiri dengan mengembangkan potensi yang desa mereka miliki. Tujuan dari pengembangan potensi desa secara mandiri tersebut untuk menjadikan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Gerakan pengembangan mandiri tersebut diawali dengan pembuatan kelompok belajar yang ditunjukkan bagi masyarakat desa usia produktif yang ada saat itu masih belum bisa membaca dan menulis. Kelompok belajar ini bertujuan agar kualitas dan kuantitas pada masyarakat desa agar pengembangan desa terus maju ke taraf yang lebih baik lagi. Kegiatan kelompok belajar ini berjalan dengan baik dengan semakin meningkatnya masyarakat yang turut ikut dalam kegiatan ini. Masyarakat mulai merasakan pentingnya kualitas diri dengan pendidikan yang akan mengarah ke wirausaha dan perekonomian mereka. Selain dengan pembelajaran, masyarakat juga diperdayakan dengan pelatihan-pelatihan

keahlian dalam bidang-bidang tertentu yang merujuk pada wirausaha agar mampu memperbaiki perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang yang kemudian diturunkan dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/032/2010 Tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mencetuskan program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang yang kemudian pada 2009 Desa/Kelurahan Nongkosawit ditetapkan sebagai Desa Vokasi yang mewakili Kecamatan Gunungpati. Dipilihnya Nongkosawit sebagai Desa Vokasi karena kegiatan kelompok belajar atau PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) yang ada di Nongkosawit berjalan dengan baik dan mampu memberi perubahan pada warga Nongkosawit di Kecamatan Gunungpati. Pada Desa Vokasi Nongkoswit ini terdapat pengembangan wirausaha masyarakat seperti usaha pertukangan, usaha menjahit, usaha boga, dan budidaya lele.

Setelah menjadi Desa Vokasi yang mewakili Kecamatan Gunungpati, Desa/Kelurahan Nongkoswit masih terus melakukan pengembangan potensi yang ada di daerahnya. Terutama saat pembangunan Waduk Jatibarang di Kecamatan Gunungpati terdapat masyarakat yang terdampak maupun tidak terdampak dari pembangunan waduk. Sehingga masyarakat perlu untuk diberi binaan agar dapat memiliki keahlian seperti kewirausahaan ataupun keahlian lainnya. Untuk itu Pokdarwis Kandang Gunung bersama masyarakat dan aparat pemerintah desa mengambil keputusan untuk mengusulkan Desa/Kelurahan Nongkosawit untuk menjadi desa binaan yang nantinya dapat menjadi salah satu desa wisata di Kota Semarang. Pengambilan keputusan tersebut sebagaimana terealisasi pada teori Grindle yang menyebutkan bahwa dalam suatu kebijakan membutuhkan pengambilan keputusan agar dapat melihat kepentingan dari keputusan tersebut.

Pengambilan keputusan untuk mengusulkan Kelurahan Nongkosawit menjadi desa wisata bertujun agar Kelurahan Nongkosawit yang telah menjadi desa vokasi semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Usulan tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu menjadi program untuk menanggulangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Dimana dalam PNPM Mandiri Pariwisata ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
2. Meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin.
4. Meningkatkan akses pemodal, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata.

Desa/Kelurahan Nongkosawit diusulkan untuk menjadi desa binaan yang nantinya akan menjadi desa wisata karena Nongkosawit memiliki potensi untuk menjadi objek wisata pertanian (agrowisata) di Kecamatan Gunungpati. Karena Nongkosawit memiliki iklim yang terbilang sejuk dan tanah berwarna coklat merah berstuktur yang cocok untuk pertanian. Pertanian dan perkebunan juga merupakan penyangga utama masyarakat Nongkosawit, sehingga usulan pembentukan Nongkosawit sebagai agrowisata dinilai sesuai. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh ketua Pokdarwis Kandang Gunung:

“Awal mulanya itu saat ada pembangunan Waduk Jatibarang, kami yang saat itu masih masih bernama Komunitas Kandang Gunung yang

peduli tentang seni budaya jawa dan lingkungan. Nah saat itu komunitas kami dilibatkan secara resmi dalam pembangunan waduk selama sekitar 6 tahun. Di tengah perjalanan pembangunan sekitar 2010 kami baru memiliki keinginan untuk mengusulkan suatu program bagi masyarakat yang terdampak maupun yang tidak terdampak. Kemudian saat itu ada kabar tentang program desa wisata. Saat itu kami baru mengusulkan ke dinas terkait pada 2011” (Warsono, 2022).

Setelah usulan tersebut kemudian dilakukan observasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dimana observasi dilakukan untuk melihat apakah Nongkosawit memenuhi syarat untuk menjadi desa wisata. Berdasarkan dari pernyataan Warsono selaku Ketua Pokdarwis Kandang Gunung di Desa Wisata Nongkosawit, desa wisata harus memenuhi syarat-syarat yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya aksesibilitas yang baik yang memudahkan wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata tersebut
2. Terdapat obyek menarik seperti alam, seni budaya, legenda atau cerita sejarah, makanan khas setempat, dan obyek lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata
3. Memiliki dukungan atau antusias yang tinggi dari aparat desa dan juga masyarakat pada pembentukan desa wisata serta pada wisatawan yang akan datang
4. Desa dengan keamanan yang terjamin baik
5. Memiliki akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai dalam menjalankan desa wisata
6. Desa tersebut masuk dalam iklim yang sejuk
7. Berhubungan dengan obyek wisata lainnya yang sudah dikenal oleh masyarakat luas

Setelah dilakukan observasi, berdasarkan syarat-syarat tersebut pada tanggal 21 Desember 2012 Nongkosawit ditetapkan sebagai desa wisata melalui SK Walikota Semarang Nomor 665/407 tentang Penetapan Kelurahan Kandri

dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang.

“.....Kemudian dilakukan observasi oleh dinas terkait ke Nongkosawit untuk melihat apakah desa tersebut memiliki syarat untuk menjadi desa wisata, syarat-syarat desa wisata ini kan yang pertama memiliki cerita sejarah yang daerah lain tidak punya, ada keunikan tradisi, ada aktivitas masyarakat yang unik tidak dimiliki daerah lain seperti budaya turun temurun. Lalu akhirnya tahun 2012 Nongkosawit mendapatkan SK Walikota sebagai desa wisata yang menjadi harapan besar bagi Komunitas Kandang Gunung untuk merealisasikan gambaran-gambaran desa wisata untuk dikembangkan” Tambah (Warsono, selaku ketua Pokdarwis Kandang Gunung, 2022).

Pemerintah Kota Semarang menetapkan Kelurahan Nongkosawit menjadi desa wisata karena Kelurahan Nongkosawit berpotensi untuk dijadikan sebagai desa wisata. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ada pada SK Walikota Semarang Nomor 556/407 bahwa Kelurahan Kandri, Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai Desa Wisata. Tujuan penetapan desa wisata di Kota Semarang ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek tujuan daerah wisata serta dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Untuk itu, Nongkosawit ditetapkan sebagai desa wisata berbasis budaya dan berbasis daya tarik kerajinan yang kemudian saat ini merambah ke daya tarik alam dan agrowisata nya yang menarik bagi wisatawan.

Selanjutnya setelah ditetapkan sebagai desa wisata, Desa Wisata Nongkosawit melakukan grand opening pada tanggal 9 Desember 2013. Obyek wisata di Desa Wisata Nongkosawit dibentuk dalam paket wisata, akan sulit apabila menerima tamu apabila tamu tersebut merupakan perseorangan. Karena obyek wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Nongkosawit tidak hanya pada satu obyek wisata saja, melainkan dengan beragam wisata yang kemudian harus

dikemas menjadi paket wisata. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Lurah Nongkosawit:

“Karena kalau desa wisata itu kan biasanya pake paket wisata, tidak kunjungan orang per orang karena paket wisata ini kan lebih efektif” (Al Choiri, 2023).

Terkait dengan pendanaan, Desa Wisata Nongkosawit mendapatkan dana dari PNPM Mandiri Pariwisata sebesar 75 juta selama tiga tahun berturut-turut dengan total dana yang didapatkan yaitu 225 juta. Pendanaan ini merupakan program yang digalakan oleh Kota Semarang untuk memfasilitasi kebutuhan pada pengembangan desa wisata. Untuk itu dalam mendukung program ini melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi memberikan dana hibah sebesar 75 juta selama tiga tahun berturut-turut untuk desa-desa baik desa yang sedang dalam binaan maupun yang sudah menjadi desa wisata.

B. Analisis Program Kebijakan Pengembangan Desa Wisata

Berdasarkan pada teori Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle, dalam melaksanakan implementasi program harus dilaksanakan dengan cara yang kompeten agar tercapai keberhasilan dari program-program tersebut. Untuk itu pembentukan program desa wisata dan pelaksanaannya perlu untuk dilakukan secara kompeten dan berdasarkan atas tujuan untuk berkembang. Dalam mengimplementasikan kebijakan SK Walikota Semarang Nomor 556/407 terkait penetapan Kelurahan Nongkosawit menjadi desa wisata. Desa Wisata Nongkosawit membentuk program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di Nongkosawit setelah ditetapkan sebagai desa wisata.

1. Program Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit

Pada Desa Wisata Nongkosawit terdapat program yang merupakan program khusus untuk Desa Wisata Nongkosawit yang dibentuk oleh Pokdarwis Kandang Gunung dengan persetujuan dan komunikasi dari aparat desa serta masyarakat setempat. Terdapat juga program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang yang programnya menyeluruh ditujukan untuk seluruh Pokdarwis yang ada di Kota Semarang.

Program Pokdarwis Kandang Gunung yang merupakan Pokdarwis pengelola pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Lingkungan

Program pelestarian lingkungan adalah program menghidupkan kembali tradisi masyarakat yang terkait dengan lingkungan wilayah desa wisata seperti tradisi nyadran. Program ini bertujuan untuk melestarikan pada lingkungan khusus di wilayah Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu program ini untuk menerapkan salah satu unsur yang ada pada Sapta Pesona, dimana Sapta Pesona bagi desa wisata memiliki 7 unsur didalamnya yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kanangan.

Pada program pelestarian lingkungan dengan menghidupkan tradisi masyarakat termasuk pada penerapan unsur bersih pada Sapta Pesona. Karena tradisi tersebut tidak hanya sebagai ucapan rasa

syukur atas hasil panen dan penghormatan pada leluhur saja. Melainkan juga dengan menjaga tradisi ini maka diharapkan dapat sebagai ajang untuk memupuk kesadaran masyarakat dalam menjaga keberihan. Tradisi nyadran yang merupakan tradisi membersihkan makam para leluhur. Tradisi yang rutin dilakukan ini akan menciptakan lingkungan bersih pada wilayah desa, dengan kebersihan wilayah desa wisata maka akan semakin menarik wisatawan untuk mengunjungi Desa Wisata Nongkosawit.

Program pelestarian lingkungan juga sebagai usaha untuk menjaga potensi yang ada di lingkungan Desa Wisata Nongkosawit. Potensi yang ada di lingkungan desa wisata ini kemudian dijadikan target yang menarik untuk tujuan wisata. Pemanfaatan potensi ini menjadi salah satu hal yang menarik dari adanya Desa Wisata Nongkosawit. Karena Pokdarwis Kandang Gunung bersama aparat desa dan masyarakat mampu untuk menjadikan potensi lingkungan mereka sebagai tujuan wisata yang akan memberikan pendapatan bagi masyarakat.

Pada program pelestarian lingkungan ini ada beberapa potensi Desa Wisata Nongkosawit yang akan dikembangkan untuk menjadi tujuan wisata yang menarik dan digemari oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Potensi yang akan dijadikan sebagai tujuan wisata tersebut antara lain yaitu:

- a. Lahan pertanian yang masih merupakan milik warga perseorangan, namun menjadi potensi untuk dijadikan sebagai tujuan wisata yang mengedukasi. Lahan pertanian tersebut terdiri dari tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, cabe, tomat, kentang, terong, ubi-ubian, padi sawah, dan tanaman lain sebagainya. Lahan pertanian yang berpotensi sebagai tujuan wisata ini perlu dijaga dan dirawat sebaik mungkin agar keberadaannya bisa terus ada.
- b. Lahan perkebunan yang masih milik warga maupun yang milik desa berpotensi untuk menjadi wisata dengan beragam

tanaman buah-buahan yang tumbuh subur di wilayah Nongkosawit. Tanaman perkebunan yang ada dan menjadi target tujuan wisata yaitu seperti tanaman rambutan, durian, mangga, nangka, jambu, kelengkeng dan lain sebagainya. Iklim yang sejuk dengan didukung tanah yang berwarna coklat merah bestktur menjadikan wilayah Nongkosawit cocok untuk pertanian dan perkebunan. Sehingga potensi ini perlu untuk dijaga pelestarian lingkungannya agar dapat semakin memberi manfaat bagi masyarakat.

- c. Lahan peternakan ikut menjadi potensi dari Desa Wisata Nongkosawit yang akan menjadi tujuan wisata bagi pengunjung yang datang. Peternakan yang ada di Nongkosawit meliputi sapi perah, sapi biasa, kambing, domba, ayam, itik, dan lain sebagainya. Peternakan ini menjadi tujuan wisata untuk wisata edukasi dengan adanya beragam jenis ternak di dalamnya.
- d. Lahan budidaya perikanan menjadi potensi tujuan wisata di Desa Wisata Nongkosawit, banyak masyarakat yang membudidayakan ikan. Budidaya perikanan ini dapat dijadikan sebagai wisata edukasi yang diminati banyak pengunjung. Selain itu juga dapat menjadi wisata pemncingan yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Program pelestarian lingkungan terus dijalankan hingga saat ini, masyarakat beranggapan bahwa pelestarian lingkungan dengan merawat dan menjaga kebersihan lingkungan desa merupakan tradisi untuk menghormati leluhur. Tradisi Sadranan merupakan tradisi bersih-bersih makam maupun sendang yang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Nongkosawit. Tradisi bersih-bersih tersebut merupakan salah satu program pelestarian lingkungan untuk menjaga kebersihan lingkungan desa. Sehingga Desa Wisata Nongkosawit mampu mewujudkan 7 unsur dalam Sapta Pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

2. Pelestarian Budaya

Program dilakukan dengan menjaga kesenian-kesenian tradisional maupun yang masih menjadi tradisi budaya yang ada di Desa Wisata Nongkosawit. Kesenian dan tradisi tradisional yang ada di Desa Nongkosawit antara lain yaitu Kirab Pusaka Kyai Bende, tradisi ini rutin dilaksanakan setahun sekali. Tradisi ini bertujuan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang didapatkan, tradisi ini dilakukan dengan kegiatan arak-arakan. Pusaka Kyai Bende sendiri dipercaya sebagai peninggalan Mbah Kyai Hasan Munadi yang merupakan murid dari Sunan Klijaga. Dimana pusaka ini dipercaya sebagai mediasi penyebaran agama islam di Nongkosawit pada ratusan tahun lalu.

Selain itu, masih terdapat banyak kesenian dan tradisi di Nongkosawit yang perlu dijaga dan dihidupkan kembali, diantaranya yaitu masih terdapat tradisi jekahan, ruwahan, dan nyadaran yang tradisi ini juga merupakan bagian dari pelestarian lingkungan. Sama halnya dengan Kirab Kyai Bende, tradisi jekahan, ruwahan, dan nyadaran juga bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah didapatkan oleh masyarakat di wilayah Nongkosawit. Tradisi Sapi Sagolo-golo menjadi tradisi yang menarik juga yang ada di Nongkosawit, dimana tradisi ini ditujukan untuk anak laki-laki yang baru dikhitan. Untuk merayakan khitanannya, anak laki-laki tersebut diminta untuk menaiki undakan atau tangga berbentuk sapi yang kemudian diarak keliling desa.

Desa Wisata Nongkosawit juga memiliki potensi dalam kesenian tarinya, dimana terdapat tarian jaran kepang dan juga tari kuntulan. Tari jaran kepang merupakan tarian yang dimana penari memakai atribut seperti kuda yang digunakan untuk menari seolah-olah penari sedang menunggangi kuda. Sedangkan tari kuntulan merupakan tari yang dimana penarinya menggunakan atribut kipas untuk atraksi menarinya. Beragam tradisi dan kesenian yang ada di Nongkosawit ini merupakan potensi yang menarik untuk dapat dijadikan sebagai

tujuan wisata. Kesenian dan tradisi yang ada tersebut tidak dimiliki oleh banyak daerah, sehingga dengan menghidupkan tradisi ini untuk tujuan wisata maka juga akan memperkenalkan budaya yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luar daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan program ini yaitu:

- a. Pemelihara Pusaka Kyai Bende yang digunakan untuk acara tradisi Kirab Kyai Bende. Pusaka yang dimaksud yaitu berupa bedug yang dipercaya sebagai peninggalan Mbah Kyai Hasan Munadi dan digunakan sebagai media dalam penyebaran agama islam.
- b. Seperangkat peralatan gamelan yang biasanya digunakan untuk pertunjukan tarian jaran kepang, tari kuntulan, dan digunakan dalam acara sapi sagolo-golo juga ikut dirawat dan dijaga.
- c. Memelihara tradisi yang ada di Nongkosawit, yaitu tradisi jekahan, tingkep tandu, ruwahan, dan nyadran yang merupakan tradisi dari dulu yang melekat di Nongkosawit. Selain sebagai menjaga dan menghormati leluhur, tradisi ini perlu dipelihara atau dijaga agar nantinya akan terus ada dan melekat sebagai tradisi yang khas di Nongkosawit.
- d. Menjaga batik yang merupakan batik khas dari Kecamatan Gunungpati, yaitu batik dengan motif kembang duren atau bunga dari buah durian. Batik dengan motif yang khas ini juga menjadi salah satu dari potensi yang ada di wilayah Nongkosawit, batik ini dapat dijadikan sebagai tujuan wisata bagi wisatawan yang ingin mencoba belajar membatik dengan motif yang khas dan unik ini. Selain itu, batik ini juga dapat dijadikan sebagai peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan menjadikannya sebagai souvenir. Untuk itu, dalam pelaksanaan program ini terdapat pengadaan peralatan untuk membatik kepada masyarakat untuk melestarikan batik dengan motif yang khas ini.

Kegiatan pemeliharaan ini adalah kegiatan untuk menjaga peralatan yang akan digunakan dalam acara tradisi yang diselenggarakan. Kegiatan tersebut sebagai penjagaan alat yang digunakan dalam tradisi agar nantinya dapat terjaga dan dipakai untuk acara tradisi budaya tersebut. Karena apabila pemeliharaan tidak dilakukan, maka alat atau puska yang merupakan barang sakral tersebut akan hilang dan tentunya akan menghilangkan tradisinya juga. Sehingga program pelestarian budaya dengan pemeliharaan alat atau puskanya perlu untuk dilakukan.

Pelaksanaan program pelestarian budaya sebelumnya berjalan dengan baik, dimana pelestarian tradisi tradisional di Nongkosawit terus dijaga dan dihidupkan kembali dengan pelaksanaan acara tradisi-tradisi tradisional tersebut. Tradisi yang dilakukan setiap satu tahun sekali tersebut terus berjalan selain sebagai menjaga tradisi agar tetap utuh, tradisi yang dilaksanakan tersebut juga sebagai salah satu ikon wisata yang menarik dan mengundang wisatawan. Namun semenjak Pandemi Covid-19, pelaksanaan tradisi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini pelestarian budaya dan tradisi tersebut tetap dijaga, namun dalam pelaksanaan acara tradisi tersebut tidak dapat seperti pada tahun-tahun sebelumnya karena kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Selain melalui pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya, terdapat juga program untuk masyarakat wilayah Nongkosawit dengan pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan keahlian kepada masyarakat untuk nantinya dapat dijadikan sebagai penunjang untuk pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Pelatihan keahlian ini merupakan hal yang dasar untuk diterapkan kepada masyarakat di wilayah desa wisata agar seluruh masyarakat dapat turut andil di dalam desa wisata. Keahlian yang dimiliki tersebut akan dijadikan

sebagai penyokong berjalannya obyek tujuan wisata yang dibentuk di Desa Wisata Nongkosawit.

Kehadiran desa wisata akan membutuhkan banyak tenaga kerja dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pengoprasian obyek tujuan wisatanya. Mayoritas masyarakat dengan keahlian tersebut akan menjadikan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja untuk Desa Wisata Nongkosawit. Karena tenaga kerja di desa wisata tentunya membutuhkan keahlian dalam bidangnya agar nanti pelaksanaan desa wisata dapat berjalan dengan baik dan dapat terus menarik pengunjung untuk datang. Perekrutan tenaga kerja dari masyarakat lokal ini bertujuan agar masyarakat yang sebelumnya belum sejahtera ataupun belum memiliki pekerjaan, dapat merasakan dengan adanya kehadiran desa wisata ini.

Program pemberdayaan masyarakat ini akan mendukung jalannya Desa Wisata Nongkosawit. Karena dari awal diusulkannya desa wisata ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah Nongkosawit. Pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain yaitu:

- a. Pengelompokkan kelompok tani, pada pembentukan kelompok tani ini para warga yang berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan kemudian disatukan dan dibentuk menjadi sebuah kelompok. Kelompok tani ini diberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara menanam, merawat, dan memanen yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga nantinya lahan pertanian ini akan menjadi tujuan wisata yang mengedukasi dengan para anggota kelompok tani sebagai tenaga kerjanya.
- b. Pengelompokkan kelompok berkebun, sama halnya dengan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan-pelatihan. Pada kelompok berkebun ini juga mendapatkan pelatihan tentang bagaimana cara menanam, merawat, dan memanen dengan

hasil yang maksimal. Pengelompokan ini juga dilakukan dengan mengelompokkan para warga yang mempunyai lahan perkebunan dan terbiasa berkebun. Perkebunan yang dimaksud adalah perkebunan buah-buahan yang menjadi ciri khas dari wilayah Gunungpati yaitu sebagai agrowisata. Perkebunan buah-buahan diantara lainnya yaitu pohon mangga, rambutan, durian, nangka, kelengkeng, jambu, dan pohon buah lainnya yang hidup di iklim sejuk. Pemberdayaan kelompok berkebun ini juga bertujuan sebagai obyek wisata dengan anggota kelompok berkebun sebagai tenaga kerjanya yang akan menambah pendapatan mereka.

- c. Kelompok peternakan, pengelompokan kelompok peternakan ini dengan mengumpulkan masyarakat yang memiliki lahan peternakan dan ternak untuk disatukan menjadi sebuah kelompok. Kelompok peternakan ini diberikan pelatihan tentang bagaimana cara merawat ternak mereka agar tidak sakit-sakitan. Kemudian diberikan juga pelatihan cara pemerahan susu sapi agar susu yang didapatkan berkualitas baik. Pelatihan mengenai ternak ini akan sangat membantu masyarakat karena pada dasarnya di wilayah Nongkosawit masyarakatnya banyak yang memiliki ternak, baik sebagai mata pencaharian ataupun sebagai sampingan. Peternakan ini juga akan menjadi komoditi yang dapat menjadi salah satu tujuan wisata di Desa Wisata Nongkosawit.
- d. Pembentukan kelompok pengrajin, kelompok pengrajin ini diberikan pelatihan-pelatihan untuk memberikan atau menambah keahlian mereka dalam bidang kerajinan. Pelatihan keahlian tersebut seperti pelatihan cara membatik, cara menjahit. Cara mengukir kayu, dan kerajinan lainnya. Pemberian pelatihan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit memiliki kualitas

keahlian yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, pelatihan kerajinan ini juga dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk mulai berwirausaha yang kemudian wirausaha ini menjadi salah satu tujuan wisata yang akan menambah pendapatan bagi masyarakat.

- e. Kelompok kerajinan tangan, kerajinan tangan menjadi hal yang diminati dan bermanfaat juga bagi banyak orang. Kerajinan tangan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dengan menjualnya sebagai cinderamata atau souvenir dari Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, kerajinan tangan juga sebagai ajang pemanfaatan barang sisa atau barang tak terpakai yang diubah menjadi barang yang unik dan bermanfaat. Saat ini di Desa Wisata Nongkosawit terdapat kerajinan-kerajinan tangan yang memanfaatkan dari barang sisa seperti kalung dan gelang jenetri, omah pang, wayang ringut, dan lain sebagainya.
- f. Kelompok kuliner, Desa Wisata Nongkosawit memiliki berbagai macam kuliner yang khas seperti wedang rojo dan makanan olahan dari bahan singkong. Makanan yang berbahan dari singkong ini sangat beragam diantaranya ada tape, cenil, getuk, dan olahan makanan lainnya. Keunikan kuliner ini perlu lah untuk dikembangkan, salah satunya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar makanan khas ini dapat terus dilestarikan dengan banyaknya masyarakat yang memiliki keahlian untuk membuatnya. Pelatihan yang diberikan yaitu berupa cara mengolah wedang rojo dan mengolah singkong menjadi berbagai macam makanan yang enak dan menarik. Kuliner ini dapat dijadikan sebagai wisata kuliner di Desa Wisata Nongkosawit yang akan menarik wisatawan dari luar daerah, terutama daerah yang tidak terdapat singkong di wilayahnya.

- g. Kelompok pemandu wisata, dalam menjalankan desa wisata diperlukan pemandu wisata untuk mempermudah dalam melayani wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. Pemandu wisata berperan untuk mengajak wisatawan berkeliling dan memperkenalkan obyek-obyek wisata yang ada di desa wisata. Untuk itu, Desa Wisata Nongkosawit juga memerlukan pemandu wisata dalam menjalankan desa wisatanya. Dalam rangka memperdayakan masyarakat, maka Desa Wisata Nongkosawit merekrut masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerjanya. Perekrutan masyarakat lokal untuk menjadi pemandu desa wisata perlu lah dibekali dengan keahlian-keahlian tentang memandu wisata. Pelatihan yang diberikan yaitu dengan memberi cara untuk menjadi pemandu wisata yang baik dan dapat berinteraksi dengan wisatawan yang berkunjung. Sasaran untuk kelompok pemandu wisata ini adalah pemuda karang taruna karena dianggap lebih berpotensi untuk menjadi pemandu wisata di Desa Wisata Nongkosawit.
- h. Sosialisasi desa wisata, masyarakat Nongkosawit juga diberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang desa wisata. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat paham tentang desa wisata dan dapat mendukung jalannya pengembangan Desa Wisata Nongkosawit.

Pengelompokkan masyarakat berdasarkan kelompok wisata ini dianggap lebih efisien dalam memberikan pelatihan-pelatihan keahlian. Sehingga pemberian pelatihan bisa langsung tertuju pada obyek wisatanya masing-masing dan pemberian pelatihan tidak harus melalui orang per orang. Kelompok-kelompok wisata ini diharapkan dapat menunjang keberhasilan Desa Wisata Nongkosawit.

Program pemberdayaan masyarakat telah diberikan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Nongkosawit baik saat menjadi Desa Wisata Nongkosawit maupun sebelumnya. Program pemberdayaan ini ditujukan agar masyarakat Desa Wisata Nongkosawit memiliki pemahaman dan keahlian dalam keikutsertaan pengembangan dan pengelolaan desa wisata melalui sosialisasi yang dilakukan. Namun program pemberdayaan itu belum sepenuhnya berhasil, dimana masih terdapat banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman mengenai desa wisata dan wisata apa yang ditawarkan di desa mereka tersebut. Program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian keahlian dalam bidang kerajinan dan kreatifitas serta pengelolaan desa wisata telah dilakukan, namun hanya oleh beberapa masyarakat yang saat ini sudah tidak turut serta dalam pengembangan desa wisata. Sehingga program pemberdayaan masyarakat ini belum memiliki hasil yang baik bagi pengembangan desa wisata.

4. Paket Wisata

Program pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat kemudian dimasukkan dalam paket wisata Desa Wisata Nongkosawit. Pembentukan paket wisata ini merupakan salah satu program untuk mengembangkan Desa Wisata Nongkosawit. Karena dengan adanya paket wisata ini dapat memberi kemudahan bagi wisatawan untuk memilih paket wisata yang akan mereka ambil. Paket wisata yang disediakan oleh Desa Wisata Nongkosawit sangat beragam, dimana disetiap paketnya terdapat berbagai macam wisata baik wisata alam, wisata kuliner, wisata kerajinan dan wisata lainnya. Paket wisata yang disediakan ini berdasarkan pada keputusan bersama antara Pokdarwis Kandang Gunung, aparat desa dan masyarakat setempat.

Paket wisata yang disediakan oleh Desa Wisata Nongkosawit ada tiga jenis diantaranya yaitu One Day Tour, Soft Traking, Jelajah

Alam. Paket yang pertama yaitu One Day Tour ini berisi berbagai wahana yaitu Museum Ronggowarsito, Waduk Jatibarang, membuat gerabah, melukis, outbond, nbruk iwak, kuliner buah, dan belajar gamelan. Sedangkan pada paket kedua Soft Traking dengan wahana yang disediakan yaitu Waduk Jatibarang, Masjid Wali, kebun buah, memberi pakan lele, pemerah susu sapi, belajar pertanian tradisional, dan belajar gamelan. Paket yang ketiga yaitu paket Jelajah Alam dengan wahanya antara lain sawah terasering, hutan, memberi pakan kera, Waduk Jatibarang, outbond deso, dan kuliner buah.

Paket wisata di Desa Wisata Nongkosawit ini masing-masing dijual dengan harga 75.000 per orangnya dengan minimal pengunjung yang datang yaitu 30 orang. Paket wisata ini sudah termasuk dengan *welcome drink*, *welcome dance* dan *lunch*. *Welcome drink* atau minuman pembuka untuk pengunjung ini akan disuguhkan minuman khas dari Nongkosawit yaitu wedang rojo yang merupakan minuman berwarna merah dengan rempah-rempah yang khas. Pada *welcome dance* atau tarian pembuka sebagai ucapan selamat datang kepada pengunjung akan ditampilkan salah satu tarian khas Nongkosawit seperti tari kuntulan dan tari jaran kepang untuk menghibur wisatawan yang datang. Paket wisata ini juga sudah termasuk suguhan makan siang dengan kuliner khas dari Nongkosawit yang utamanya merupakan olahan makanan dari bahan singkong.

Pada program paket wisata tersebut paket yang ditawarkan cukup menarik bagi wisatawan, dimana paket wisata yang ada di Desa Wisata Nongkosawit menyuguhkan berbagai paket wisata. Terdapat paket wisata alam dan wisata buatan serta suguhan makanan tradisional dan seni budaya tradisional. Namun program paket wisata ini belum secara maksimal pelaksanaannya, paket wisata yang ditawarkan belum berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat kendala dalam berjalannya paket wisata tersebut seperti tidak adanya akses ke wisata alam yang ada dan kurangnya orang yang sebagai pengelola

dalam pelaksanaan paket wisata tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Taufiq selakau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Divisi Kelembagaan.

“Kalau Nongkosawit itu paket wisatanya aja belum bisa berjalan dengan baik, masih kurang dalam pengelolaannya” (Taufiq, 2023).

Gambar 4. 1 Paket Wisata Desa Wisata Nongkosawit



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

5. Pemetaan Wilayah Desa Wisata Nongkosawit

Desa Wisata Nongkosawit merupakan wilayah desa dengan cakupan wilayah yang luas yaitu kurang lebih 240.756 Ha yang

terdiri dari lima RW atau lima kampung di dalamnya. Untuk itu pemetaan wilayah Nongkosawit yang akan dijadikan sebagai tujuan obyek wisata haruslah tertata dengan rapi agar dapat memberikan informasi bagi wisatawan yang berkunjung. Meskipun sudah terdapat pemandu wisata, namun pemetaan wilayah ini juga perlu untuk dilakukan. Adanya berbagai wisata yang disediakan juga menjadi alasan perlunya dilakukan pemetaan di wilayah Desa Wisata Nongkosawit yang akan memudahkan pengunjung untuk mencari informasi wisata yang mereka ingin kunjungi.

Pemetaan wilayah ini terdiri dari shelter transportasi, area parkir, pintu gerbang tiket, wisata kebun buah, kantor pengelola, wisata seni dan budaya, wisata ternak, pasar seni, wisata sendang. Gapura utama sebagai jalur masuknya pengunjung yaitu berada di gang RW 1 kampung Nongkosawit dengan area parkir yang berada di samping kanan jalan dan disusul pintu gerbang tiket disebalah area parkir. Pemetaan ini merupakan gambaran dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit yang telah dirundingkan Pokdarwis Kandang Gunung bersama dengan masyarakat dan aparat desa.

Namun dalam pelaksanaan program pemetaan wilayah ini belum sepenuhnya diterapkan di Desa Wisata Nongkosawit dalam pengembangan desa wisatanya. Pemetaan wilayah desa wisata yang sebelumnya sudah dirancang pada tahun 2013 saat belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal saat pembentukan. Terdapat beberapa titik dalam pemetaan wilayah yang belum dapat terealisasi dengan baik seperti pintu gerbang tiket, shelter transportasi, pasar seni, dan kantor pengelola yang hingga saat ini belum terealisasi dengan baik. Program pemetaan wilayah yang berhasil seperti gerbang utama, pada pemetaan wisata buah, wisata ternak, wisata sendang, dan wisata masjid wali.

Gambar 4. 2 Peta Desa Wisata Nongkosawit



(Sumber: Pokdarwis Kandang Gunung)

Desa Wisata Nongkosawit memiliki program yang tertata sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh aparat desa dan masyarakat, dimana program tersebut akan menjadi daya tarik wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Potensi sumber daya yang ada di desa menjadi penyokong utama untuk melaksanakan program pengembangan Desa Wisata, potensi-potensi yang dikembangkan ini akan memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, didukung dengan sumber daya manusia di Desa Wisata Nongkosawit dengan jumlah penduduk sekitar 5833 jiwa yang menjadi tenaga kerja lokal untuk pelaksanaan Desa Wisata Nongkosawit. Dukungan baik sumber daya alam dan budaya ataupun sumber daya manusia di Desa Wisata ini menjadi pendorong untuk melaksanakan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Pihak Kelurahan turut memberikan dukungan dalam mengembangkan Desa Wisata Nongkosawit ini. Dukungan yang diberikan tersebut dengan melalui pemberian izin, baik izin penggunaan lahan ataupun izin pelaksanaan acara untuk tujuan wisata. Selain itu, Kelurahan mengusulkan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang dapat dimasukkan dalam musrenbang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah Nongkosawit:

“Peran Kelurahan itu terkait pada pengusulan infrastruktur yang mungkin bisa dimasukkan kedalam musrenbang, kita juga memberikan izin saat ada acara-acara”(Al Choiri, 2023).

Namun sejak ditetapkannya Kelurahan Nongkosawit menjadi desa wisata pada tahun 2012 hingga saat ini, Desa Wisata Nongkosawit pada pelaksanaan programnya belum sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirancang sebelumnya oleh Pokdarwis, aparat desa, dan masyarakat. Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit saat ini masih stagnan, terutama setelah Pandemi Covid-19 Desa Wisata Nongkosawit tidak mengalami perkembangan lagi. Hal ini juga disampaikan oleh Lurah Nongkosawit:

“Desa Wisata Nongkosawit itu kan sudah dicanangkan sejak tahun 2012 bareng dengan Kandri dan Wonolopo, namun memang sampai saat ini belum sesuai dengan yang diinginkan” (Al Choiri, 2023).

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, keberhasilan dari pelaksanaan implementasi ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) tersebut. Analisis isi kebijakan pada Desa Wisata Nongkosawit menurut model implementasi Grindle, isi kebijakan di Desa Wisata Nongkosawit memiliki pengaruh yang penting bagi para *Stakeholder* seperti masyarakat dan juga aktor lainnya. Pengaruh kepentingan ini terkait pada perubahan dari Kelurahan Nongkosawit menjadi Desa Wisata untuk menjadi desa yang maju. Melalui pada pengalokasian sumber daya yang ada untuk mendukung program implementasi, sumber daya tersebut yaitu dengan potensi yang ada di setiap RW dan didukung dengan kecukupan sumber daya manusianya. Namun dalam pelaksanaan isi kebijakan tersebut, kecukupan sumber daya manusia yang ada belum dapat mendukung jalannya program kebijakan yang telah dirancang.

Program yang dirancang untuk mengembangkan Nongkosawit setelah ditetapkan sebagai desa wisata ini belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle bahwa pelaksanaan atau implementasi program perlu dilaksanakan secara kompeten untuk keberhasilan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan

program, para *stakeholder* di Desa Wisata Nongkosawit belum sepenuhnya dapat kompeten dalam implementasinya. Dimana masih terdapat program-program yang belum sesuai dengan tujuan perencanaan program tersebut seperti pada program pemberdayaan masyarakat dan pemetaan wilayah Desa Wisata Nongkosawit. Belum tercapainya pelaksanaan program pengembangan desa wisata secara kompeten tersebut menjadikan dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih stagnan.

2. Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program pelatihan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk Pokdarwis Kota Semarang diantaranya yaitu:

1. Pelatihan Pengelolaan usaha homestay/pondok wisata

Pelatihan ini dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 135.208.420,- tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pengelola desa wisata. Agar pengelola desa wisata lebih profesional dan berkualitas dalam melakukan pengelolaan desa wisata dan memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Sasaran yang harus dicapai oleh masing-masing peserta dari pelatihan ini antara lain yaitu:

- a. mengetahui dan memahami pengetahuan dan kepariwisataan
- b. mengetahui dan memahami pentingnya Sapta Pesona dalam mewujudkan masyarakat Sadar Wisata
- c. mengetahui dan memahami pengembangan kelembagaan pengelola desa wisata.
- d. mengetahui dan memahami pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata di desa wisata

Pelatihan ini menggunakan metode: 50,00% penyampaian materi; 16,67% diskusi dan kerja kelompok; dan 33,33% kunjungan lapangan. Untuk lama waktu pelatihan yaitu selama 24 jam dalam tiga hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit. Target peserta pada pelatihan ini yaitu 50 orang peserta pelatihan dan belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan desa wisata sebelumnya, peserta tersebut sedikitnya terdiri dari

unsur pengelola desa wisata dan Pokdarwis, juga dari komunitas Denok Kenang Semarang.

2. Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata

Pelatihan ini dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 135.208.429,- tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pengelola usaha kuliner dalam melakukan inovasi dan meningkatkan higienitas sajian kulinernya agar lebih berkualitas dan bernilai jual.

Sasaran yang harus dicapai masing-masing peserta dalam pelatihan antara lain yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami pentingnya inovasi dan higienitas dalam sajian kuliner
- b. Mengetahui dan memahami berbagai standar dan ketentuan nasional dan internasional tentang higienitas penyajian kuliner
- c. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam melakukan kreativitas dan inovasi untuk sajian kuliner
- d. Mendapat pengalaman untuk melakukan inovasi dan menerapkan higienitas dalam sajian kuliner

Pelatihan ini menggunakan metode: 37,50% penyampaian materi; 12,50% diskusi dan kerja kelompok; dan 50,00% praktik. Untuk lama waktu pelatihan yaitu diselenggarakan selama 32 jam dalam empat hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit. Target peserta pada pelatihan ini yaitu 50 orang peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner sebelumnya, peserta tersebut sedikitnya terdiri dari unsur pengelola usaha kuliner dan karyawan di usaha jasa atau usaha kuliner (makanan dan minuman).

3. Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Branding

Pelatihan digitalisasi pemasaran branding ini diadakan setiap satu tahun sekali. Tujuan dari pelatihan ini yaitu agar peserta dapat memasarkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga setiap daerah yang dikelola oleh masing-masing peserta dapat terus dikenal oleh masyarakat lokal

maupun luar daerah. Pelatihan ini ditujukan untuk peserta yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Disbudpar tersebut. Target peserta yang mengikuti pelatihan ini yaitu perwakilan dua atau tiga orang dari setiap Pokdarwis yang ada di Kota Semarang.

4. Pelatihan Pemandu Wisata

Pelatihan ini sangat berguna bagi desa wisata di Kota Semarang, karena dengan pelatihan pemandu wisata ini akan memberikan pengetahuan dan keahlian masyarakat atau pengelola desa wisata dalam melayani pengunjung yang datang. Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memberikan keahlian kepada masyarakat terutama pada sektor desa wisata agar dapat melayani pengunjung dengan baik. Pelayanan yang baik akan menjadikan semakin banyak pengunjung yang datang, sehingga akan berpengaruh juga pada pengembangan desa wisata. Target peserta pada pelatihan ini yaitu dua atau tiga orang perwakilan dari Pokdarwis desa wisata maupun sektor wisata daerah lainnya. Peserta ditujukan untuk masyarakat atau pengelola yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi perwakilan pada pelatihan yang diadakan Disbudpar Kota Semarang.

5. Sinau Bareng

Program ini merupakan pengelompokan untuk mengajak Pokdarwis agar saling berdiskusi dan berbagi ilmu. Pada program ini desa wisata atau sektor wisata yang masih rintisan dapat belajar dari desa wisata atau sektor wisata daerah lainnya yang sudah maju. Sehingga dalam kelompok sinau bareng ini para pengelola desa wisata dan sektor wisata daerah lainnya memiliki ruang untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan wisatanya. Program sinau bareng ini diadakan setiap tiga bulan sekali dengan berkumpul bersama di suatu daerah wisata yang mau menyediakan tempat untuk berkumpul. Pengajar atau mentor dalam program ini yaitu para praktisi yang juga merupakan kelompok sinau bareng, sehingga bisa memberikan masukan-masukan dan arahan terhadap permasalahan di masing-masing pengembangan wisata.

6. Perlombaan Pokdarwis

Program lain dari Disbudpar yaitu terdapat perlombaan-perlombaan untuk seluruh Pokdarwis di Kota Semarang. Perlombaan ini bertujuan untuk memotivasi para Pokdarwis agar mengembangkan daerahnya masing-masing supaya menjadi wisata daerah yang menarik dan menjadi juara. Selain itu, diadakannya perlombaan antar Pokdarwis di Kota Semarang ini agar setiap Pokdarwis dapat turut melihat potensi-potensi yang ada di setiap daerah yang mengikuti perlombaan ini. Sehingga Pokdarwis yang mendapatkan juara dari perlombaan tersebut dapat dijadikan teladan oleh Pokdarwis yang lain untuk lebih meningkatkan kualitas Pokdarwisnya.

Program-program yang dibentuk oleh Disbudpar Kota Semarang tersebut untuk mendukung pengembangan desa wisata dan sektor wisata daerah lainnya di Kota Semarang. Pelatihan ini ditujukan untuk seluruh Pokdarwis yang ada di Kota Semarang, sehingga Disbudpar tidak memeberikan program pelatihan secara khusus pada masing-masing desa wisata. Melalui program pelatihan-pelatihan ini diharapkan mampu memeberikan keahlian dan kualitas masyarakat yang lebih baik lagi dalam mengelola desa wisata di daerah masing-masing peserta pelatihan. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dari Disbudpar ini merupakan anggaran dari Kemenparekraf. Sehingga pelaksanaan program-program tersebut masih dalam pengawasan Kemenparekraf dengan adanya laporan dari setiap pelaksanaan program oleh Disbudpar Kota Semarang.

Program pelatihan-pelatihan oleh Disbudpar ini ditujukan untuk peserta yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Disbudpar tersebut. Tujuannya yaitu agar pemberian pelatihan dapat menyeluruh ke setiap orang yang mengelola desa wisata atau sektor wisata daerah lainnya. Karena peserta pada setiap pelatihan ini diikuti oleh dua atau tiga orang perwakilan dari setiap Pokdarwis di Kota Semarang. Untuk itu, pelaksanaan pelatihan yang ditujukan untuk peserta yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan dianggap akan efektif karena materi pelatihan dapat merata didapatkan oleh setiap orang. Sehingga setiap anggota Pokdarwis memiliki keahlian yang baik dalam menjalankan program di wisata daerahnya masing-masing.

Gambar 4. 3 Hasil Rapat Tentang Program Peningkatan Desa Wisata

HASIL RAPAT	
Hari / tanggal	: Senin, 10 April 2023
Jam	: 10.00 wib
Tempat	: Rg rapat Disbudpar Kota Semarang Gd Pandanaran It 8
Acara	: Rapat koordinasi persiapan Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi Pariwisata
Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik) TA 2023 dengan pagu anggaran Rp. 135.208.429,- dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pengelola usaha kuliner dalam melakukan inovasi dan meningkatkan higienitas sajian kulinernya agar lebih berkualitas dan bernilai jual.	
Dengan sasaran yang harus dicapai masing-masing peserta :	
1) mengetahui dan memahami pentingnya inovasi dan higienitas dalam sajian kuliner;	
2) mengetahui dan memahami berbagai standar dan ketentuan nasional dan internasional tentang higienitas penyajian kuliner;	
3) mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam melakukan kreativitas dan inovasi untuk sajian kuliner;	
4) mendapat pengalaman untuk melakukan inovasi dan menerapkan higienitas dalam sajian kuliner.	
a. Metode Pelatihan	
Pelatihan diselenggarakan dengan metode:	
± 37,50% penyampaian materi;	
± 12,50% diskusi dan kerja kelompok;	
± 50,00% praktik.	
b. Lama Waktu Pelatihan	
Pelatihan diselenggarakan selama 32 jam dalam 4 (empat) hari, dengan satu jam pelatihan adalah 45 menit.	
Pelaksanaan tanggal 8 s/d 10 Mei 2023 di hotel Pandanaran dan tanggal 11 Mei 2023 OL (praktek)	
c. Target Peserta	
Peserta Pelatihan 50 orang yang belum pernah mengikuti Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner, serta sedikitnya terdiri dari unsur:	
1) pengelola usaha kuliner;	
2) karyawan di usaha jasa usaha kuliner (makanan dan minuman).	
d. Narasumber/Pengajar/Instruktur/Fasilitator	
1) Narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator harus memenuhi persyaratan, yaitu:	
a) memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan inovasi terhadap sajian kuliner;	
b) memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian terhadap higienitas sajian kuliner;	
c) memiliki surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan sejenis	

(Sumber: Disbudpar Kota Semarang)

Pokdarwis Kandang Gunung yang berada di Desa Wisata Nongkosawit juga termasuk peserta dalam pelatihan yang diadakan Disbudpar ini. Keikutsertaan Pokdarwis Kandang Gunung menjadi peserta dalam pelatihan ini. Dari pelatihan ini diharapkan agar para pengelola Desa Wisata Nongkosawit memiliki keahlian dalam mengelola program pengembangan desa wisatanya. Meskipun sudah ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 2013, namun pengembangan Desa Wisata Nongkosawit harus terus dilakukan agar semakin menjadi desa wisata yang menarik bagi wisatawan. Untuk itu Pokdarwis di Desa Wisata Nongkosawit perlu mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Disbudpar Kota Semarang.

Namun dalam pelaksanaannya, keikutsertaan Desa Wisata Nongkosawit dalam pelatihan yang diadakan Disbudpar belum diikuti secara keseluruhan oleh Pokdarwis di Desa Wisata Nongkosawit. Keaktifan peserta dari Pokdarwis dan masyarakat di Desa Wisata Nongkosawit dalam mengikuti pelatihan masih sangat kurang. Hal ini terlihat pada perwakilan dari Desa Wisata Nongkosawit yang hanya diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pokdarwis Kandang Gunung secara berulang tanpa adanya perwakilan lain dari anggota Pokdarwis maupun masyarakat. Padahal program dari Disbudpar Kota Semarang ini ditujukan untuk peserta yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Disbudpar ini. Tujuannya yaitu agar seluruh pengelola desa wisata memiliki keahlian secara merata untuk mengelola desa wisata mereka. Perwakilan peserta dari Pokdarwis di Desa Wisata Nongkosawit yang hanya diwakilan oleh orang-orang tertentu saja, maka akan menjadikan keahlian dalam pengelolaan desa wisata hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas pengembangan desa wisata, karena pengembangan desa wisata harus dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di desa yang memiliki keahlian dalam mengelola desa wisata agar semakin berkembang dan menarik wisatawan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut:

“Nongkosawit itu belum, gimana ya orangnya masih itu-itu atau tertentu saja yang mengikuti pelatihan. Paling Nongkosawit itu yang mewakili ya ketuanya, sekretaris, sama bendaharanya, dukungan dari anggota Pokdarwis dan masyarakatnya itu masih kurang” (Taufiq, 2023)

Kurang aktifnya Desa Wisata Nongkosawit dalam mengikuti program pelatihan dari Disbudpar ini menjadikan pengelola desa wisata yang memiliki keahlian hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga implementasi kebijakan melalui program desa wisata yang dirancang oleh Desa Wisata Nongkosawit juga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal program-program yang direncanakan oleh Desa Wisata Nongkosawit merupakan program yang menjadi pendukung untuk mengelola Desa Wisata Nongkosawit menjadi desa

wisata yang dikenal orang banyak dan juga menarik pengunjung. Melalui pemanfaatan potensi yang ada di desa dan dikembangkan menjadi tujuan wisata yang unik dan menarik karena tidak dimiliki oleh daerah lainnya yang menjadi program Pada Pengembangan Desa Wisata. Namun kurangnya dukungan dari anggota Pokdarwis dan juga masyarakat Nongkosawit untuk mengikuti pelatihan dalam rangka menambah keahlian menjadikan program Desa Wisata Nongkosawit yang sudah dirancang dengan memanfaatkan potensi desa tersebut hingga saat ini belum berjalan sesuai yang diinginkan.

C. Perubahan Kelurahan Nongkosawit Sebagai Desa Wisata

Pengembangan Kelurahan Nongkosawit menjadi sebuah Desa Wisata memberikan perubahan baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakatnya. Perubahan tersebut terlihat dari peternakan yang sebelumnya hanya sebagai mata pencaharian warga sekitar berubah menjadi salah satu sektor wisata yang turut menaikkan perekonomian warga. Selain peternakan, perkebunan dan persawahan juga berkembang menjadi sektor wisata di Desa Wisata Nongkosawit yang memberikan keuntungan bagi warga pengelola. Perubahan lainnya yaitu dengan adanya Desa Wisata Nongkosawit, Kelurahan Nongkosawit lebih dikenal oleh masyarakat luas diluar Desa/Kelurahan Nongkosawit.

Desa Wisata Nongkosawit ini juga memberikan perubahan pada gapura masuk desa yang kini semakin baik dengan infrastruktur jalan yang memadai dan dapat dilewati dengan mudah. Perubahan Nongkosawit yang kini menjadi lebih banyak dikenal orang dengan keunikan dan tradisi desa wisatanya tersebut mengundang ketertarikan wisatawan untuk datang. Ketertarikan wisatawan ini menjadi salah satu potensi untuk mengembangkandesa wisata dan bermanfaat bagi sosial budaya dan perekonomian masyarakat desa. Namun perubahan yang terjadi tersebut belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Grindle bahwa pada setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga isi kebijakan yang ingin dijelaskan harus memiliki skala yang rinci. Karena dalam perubahan Kelurahan Nongkosawit menjadi desa wisata ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di desa. Area tujuan wisata yang masih berada dalam satu wilayah tertentu saja yang menjadikan banyak masyarakat belum

merasakan manfaat dengan adanya Desa Wisata Nongkoswit. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang warga sekitar:

“Kalau untuk saat ini belum merasakan manfaatnya ya mba ya, soalnya kan desa wisatanya belum banyak yang kesini ya dan pengunjung juga belum banyak. Waktu rame juga manfaatnya belum sampai sini karena ramenya baru disekitaran lapangan saja” (Saudara Y, 2023).

Namun, pernyataan lain disampaikan oleh Subakdo yang juga merupakan warga dari Desa Wisata Nongkosawit terkait manfaat desa wisata bagi masyarakat. Adanya Desa Wisata Nongkosawit ini dirasa telah memberikan manfaat untuk warga, terutama pada warga yang memiliki pertanian dan peternakan. Selain sebagai mata pencaharian, peternakan dan pertanian milik warga dijadikan sebagai salah satu wisata di Desa Wisata Nongkosawit. Sehingga hal tersebut menambah pendapatan bagi warga sekitar yang memiliki peternakan dan pertanian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Subakdo sebagai berikut:

“Ada ya manfaatnya ini bagus untuk orang-orang sekitar sini, terutama buat yang disini pada ternak sapi, ternak ayam, kambing, pertanian juga jadi dapat manfaatnya” (Subakdo, 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, perubahan Kelurahan Nongkosawit menjadi Desa Wisata belum dirasakan manfaatnya oleh semua warga. Hal ini karena manfaat dari adanya desa wisata dan program tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Manfaat dari desa wisata baru dirasakan oleh beberapa warga saja yang memiliki objek untuk dijadikan sebagai salah satu potensi wisata. Sehingga pelaksanaan program dalam pengembangan desa wisata harus terus ditingkatkan agar perubahannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan dapat memberikan manfaat bagi banyak warga yang ada di sekitar Desa Wisata Nongkosawit.

Belum maksimalnya derajat perubahan yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata tersebut karena terdapat kendala dalam implementasi program desa wisata yang telah direncanakan. Meskipun terdapat banyak faktor

pendorong seperti sumber daya alam yang berpotensi dan jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai untuk pelaksanaan program Desa Wisata Nongkosawit. Namun terdapat kendala atau hambatan yang menyebabkan proses pelaksanaan program desa wisata ini tidak berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang ada yaitu terkait pada pendanaan dan partisipasi masyarakat sekitar dalam mendukung pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Nongkosawit sebagai berikut:

1. Pendanaan

Ditetapkannya Kelurahan Nongkosawit menjadi desa wisata pada tahun 2012 turut didukung dengan pemberian dana oleh Kemenparekraf yang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dana yang diberikan tersebut sebesar 75 juta selama tiga tahun berturut-turut, dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana seperti papan penunjuk arah yang mampu untuk memberikan kesan informatif bagi pengunjung yang datang untuk berwisata. Dana yang diberikan selama tiga tahun berturut-turut ini berjumlah 225 juta dalam tiga tahun. Sedangkan berdasarkan DED (Detail Engineering Design) yang pembutannya dibantu oleh Persatuan Insinyur Arsitek Jawa Tengah, untuk mendukung terbentuknya desa wisata secara keseluruhan membutuhkan dana sebesar 13 milyar. Sehingga dalam pembentukan Desa Wisata ini masih memerlukan dana yang banyak agar dapat terbentuk desa wisata secara keseluruhan sesuai dengan DED nya.

Sejak ditetapkannya Kelurahan Nongkosawit menjadi desa wisata hingga saat ini, masalah pendanaan masih menjadi hambatan untuk mengembangkan Desa Wisata Nongkosawit agar sesuai dengan apa yang diinginkan dan telah direncanakan. Dalam pengembangan desa wisata, dana menjadi hal yang sangat penting karena hal ini merupakan pendukung utama dalam pembentukan desa wisata. Untuk membantu desa wisata sesuai dengan yang direncanakan agar mampu menarik wisatawan untuk terus datang, maka konsep DED yang sudah direncanakan gambarannya harus terbentuk sesuai yang diinginkan. Namun hingga saat ini tidak ada pendanaan yang berupa uang tunai untuk desa wisata di tingkat Kelurahan. Kendala dari pendanaan ini menyebabkan pengembangan

Desa Wisata masih stagnan hingga saat ini. Hal ini juga disampaikan oleh ketua Pokdarwis Kandang Gunung selaku pengelola Desa Wisata Nongkosawit:

“Sampai saat ini untuk pembinaan secara khusus yang berupa uang tunai memang tidak ada, dan ini merupakan kendala saat ini di seluruh Indonesia, desa-desa yang berada di Kelurahan tidak dapat dana”
(Warsono, 2023).

Berdasarkan pernyataan dari Ketua Pokdarwis tersebut, tidak adanya dana yang berupa uang tunai ini menjadikan kendala dalam pelaksanaan program maupun dalam pembentukan sarana dan prasarana yang ingin dibentuk. Sehingga saat ini pengembangan desa wisata yang berada di Kelurahan dan yang tidak termasuk dalam Kelurahan jauh berbeda pengembangannya. Bagi Desa Wisata Nongkosawit sendiri, pendanaan berupa uang tunai secara fisik merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan pengembangan desa wisata untuk mendukung tujuan-tujuan wisata yang sudah direncanakan.

Ketidakadaan dana fisik ini menjadikan rencana-rencana pembentukan Desa Wisata Nongkosawit tidak dapat terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan dan hal ini menjadikan potensi-potensi yang ada di Nongkosawit tidak dapat dikembangkan. Potensi-potensi desa yang tidak dapat dikembangkan karena kendala dana ini menyebabkan hingga saat ini potensi yang seharusnya dapat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan tidak dapat terealisasi seperti Curug Mah Tukung yang berada di RW 2 Randusari. Curug atau Air Terjun ini merupakan potensi besar yang dimiliki Nongkosawit untuk dapat dijadikan wisata alam yang menarik dan memberikan edukasi. Namun hingga saat ini belum ada pembentukan trek atau jalan untuk menuju ke wisata Curug Mah Tukung yang menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di Desa Wisata Nongkosawit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Kandang Gunung:

“Kita sebenarnya banyak gambaran-gambaran yang ingin dilakukan seperti bikin trek jalan ke curug itu kita bikin jalan terus buat wisata

yang mau hiking gitu, tapi ya itu belum bisa terealisasikan karena tidak ada dananya” (Warsono, 2023).

Pokdarwis Kandang Gunung memiliki berbagai rencana dalam mengembangkan Desa Wisata Nongkosawit agar menjadi desa wisata dengan obyek tujuan wisata yang menarik bagi masyarakat luar daerah. Namun rencana-rencana masih hanya dalam gambaran karena tidak terdapat dana untuk pembentukan Desa Wisata Nongkosawit sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga saat ini belum ada pertemuan ataupun diskusi terkait dengan pengembangan desa wisata kedepannya.

“...kalo mengumpulkan orang untuk diskusi nanti mau bikin apa buat wisata gitu sebenarnya bisa dan banyak ide untuk membuat wisata-wisatanya, namun kita kalo mengumpulkan orang untuk diskusi tapi tidak ada dana untuk menjalankan gambaran yang kita diskusikan kan buat apa sama saja tidak jalan” Tambah (Warsono selaku Ketua Pokdarwis Kandang Gunung, 2023).

Pada kendala pendaan ini, kendala yang paling utama yaitu terkait pada dana fisik berupa uang tunai untuk pembangunan desa wisata yang telah direncanakan. Hal ini karena urangnya kepedulian dari pihak lembaga terkait seperti Disbudpar dan Kelurahan Nongkosawit dalam merespon kendala pendaan fisik tersebut. Pihak Kelurahan mendukung pengembangan desa wisata dengan penyediaan keperluan infrastruktur desa wisata melalui usulan infrastruktur yang diperlukan oleh desa wisata dan dapat dimasukkan dalam Musrenbang. Untuk dukungan pelatihan-pelatihan masyarakat diberikan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat di desa wisata.

2. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata, karena masyarakat sebagai pelaksana pengelolaan desa wisata bersama dengan Pokdarwis dan aparat daerah. Sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung jalannya pengembangan desa

wisata, karena semua tenaga kerja desa wisata merupakan masyarakat sekitar desa itu sendiri. Namun di Desa Wisaa Nongkosawit masih belum berpartisipasi secara keseluruhan, dimana banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Pemahaman masyarakat tentang desa wisata masih sangat kurang, masyarakat sekitar desa menganggap desa wisata merupakan obyek wisata seperti pada wisata-wisata umumnya. Sehingga masyarakat yang merasa bahwa di Desa Wisata Nongkosawit tidak memiliki obyek wisata dan hanya desa saja, karena tidak terdapat obyek wisata yang besar di desa. Padahal Desa Wisata Nongkosawit memiliki tujuan-tujuan wisata yang menarik di setiap RW nya.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat ini menyebabkan tidak adanya dukungan dalam pelaksanaan program Desa Wisata Nongkosawit. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pokdarwis dan aparat des belum sepenuhnya memberikan pemahaman bagi masyarakat sekitar. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang desa wisata sehingga belum ada kesadaran dari masyarakat untuk mendukung jalannya program pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Kandang Gunung:

“Masyarakat itu belum semua paham sama konsep desa wisata, di pemahaman mereka desa wisata itu obyek wisata yang ada wisata terkenalnya gitu jadi partisipasi masyarakat disini ya masih kurang”
(Warsono, 2023)

Edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman desa wisata saat ini masih terus dilakukan oleh Pokdarwis maupun pihak Kelurahan. Tujuannya agar seluruh masyarakat di Nongkosawit paham bahwasanya desa wisata merupakan wisata dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya dan menjadi keunikannya sendiri. Sehingga tidak ada lagi pemahaman masyarakat tentang desa wisata yang harus memiliki obyek wisata besar. Karena saat ini masih banyak masyarakat Nongkosawit yang belum mengerti konsep desa wisata dan belum mengetahui potensi-potensi di daerahnya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah Nongkosawit:

“Memang salah satu kendalanya adalah peran serta masyarakat yang masih kurang sehingga edukasi tentang pemahaman kepada masyarakat terkait dengan desa wisata terus dilakukan. Karena di pandangan masyarakat, desa wisata itu ada desa wisata. Kan bukan seperti itu, desa wisata in kan potensi-potensi wilayah, kearifan lokal yang dipamerkan ataupun dijual” (Al Choiri, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit hanya anggota Pokdarwis dan beberapa masyarakat saja yang turut serta dalam pelaksanaan program desa wisata. Banyak masyarakat diluar Pokdarwis Kandang Gunung tidak turut berpartisipasi pada pelaksanaan program desa wisata karena belum ada kesadaran dari masyarakat yang lain terkait pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, beberapa masyarakat merasa jenuh melakukan aktivitas yang sama yaitu mengembangkan Desa Wisata Nongkosawit sejak ditetapkannya pada tahun 2012. Sehingga banyak masyarakat yang sudah tidak ikut berpartisipasi kembali dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata saat ini. Kejenuhan dari masyarakat ini menjadi kendala dalam membangkitkan kembali Desa Wisata Nongkosawit untuk menjadi desa wisata yang lebih maju lagi.

Selain itu, banyaknya masyarakat baik anggota maupun bukan anggota Pokdarwis Kandang Gunung yang pindah tempat tinggal sehingga tidak menjadi warga Nongkosawit lagi. Warga atau masyarakat tersebut merupakan orang yang sudah memiliki skill atau ketrampilan dalam pengembangan desa wisata dengan melalui pelatihan-pelatihan sebelumnya. Sehingga dalam pengembangannya, Desa Wisata Nongkosawit kekurangan tenaga kerja yang sebelumnya sudah memiliki kualitas dan ketrampilan seperti kuliner, pemandu wisata, homestay, ternak, tani, dan ketrampilan lainnya. Hal ini termasuk dalam kendala bagi pengembangan desa wisata karena tidak adanya tenaga kerja dengan ketrampilan tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan ulang kepada masyarakat yang tentunya akan membutuhkan waktu yang begitu lama.

Banyaknya masyarakat yang keluar dari anggota kelompok Pokdarwis Kandang Gunung tersebut menjadikan pelaksanaan program yang ingin

dijalankan tidak dapat berjalan dengan baik. Karena anggota yang sudah dibina dengan pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya sudah semakin berkurang, sehingga perlu dilakukan reorganisasi dan pelatihan ulang pada anggota Pokdarwis yang baru. Namun, sejak dibentuk Pokdarwis Kandang Gunung hingga sekarang belum dilakukan reorganisasi atau pembentukan ulang organisasi. Reorganisasi dan pelatihan masyarakat ini perlu dilakukan untuk membentuk organisasi Pokdarwis yang baru. Program pelatihan ini telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, tetapi untuk reorganisasi Pokdarwis Kandang Gunung hingga saat ini belum dilakukan.

BAB V

RELASI ANTAR STAKEHOLDER DESA WISATA NONGKOSAWIT

A. Koordinasi Keterlibatan Para Aktor Dalam Implementasi

Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk menjalankan rencana kegiatan yang diinginkan, sehingga pada pelaksanaannya masing-masing pihak akan berjalan selaras secara bersama-sama. Pada pengembangan desa wisata juga diperlukan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam mengelola destinasi-destinasi tujuan wisata. Berdasarkan teori implementasi menurut Grindle, lingkungan implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. Pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan pada kekuatan, kekuasaan, dan strategi yang digunakan untuk digunakan para aktor politik dalam pelaksanaan kebijakan, karena aktor politik terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Untuk itu pengelolaan desa wisata membutuhkan keterlibatan dari seluruh unsur di desa maupun pada pemerintahan. Keterlibatan aktor tersebut melalui koordinasi mengenai kekuasaan, kekuatan, dan strategi apa yang digunakan dalam implementasi. Apabila tidak terdapat koordinasi dalam menjalankan pengembangan desa maka pengembangan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Desa Wisata Nongkosawit dalam melaksanakan pengembangannya juga melakukan koordinasi kepada para pihak yang terkait diantaranya yaitu, Disbudpar Kota Semarang, aparat Kelurahan Nongkosawit, Pokdarwis Kandang Gunung, dan juga masyarakat setempat. Koordinasi pada pengembangan Desa Wisata Nongkosawit ini bertujuan agar para pihak yang terlibat pada pengembangan desa wisata memiliki arah dan tujuan yang sama dalam mengembangkan desa wisata. Terutama dalam mengimplementasikan kebijakan desa wisata dengan melalui program-program yang telah dirancang sebelumnya oleh Desa Wisata Nongkosawit maupun Disbudpar Kota Semarang. Sehingga program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dari perencanaan program-program tersebut. Koordinasi yang

dilakukan oleh pihak-pihak pada pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit diantaranya yaitu:

1. Koordinasi Disbudpar Kota Semarang dengan Pokdarwis

Disbudpar Kota Semarang melakukan koordinasi terkait pengembangan desa wisata maupun sektor wisata daerah lainnya di Kota Semarang. Koordinasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan wisata di masing-masing daerah tersebut. Koordinasi yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Semarang ditujukan pada seluruh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Kota Semarang. Pokdarwis yang berada di Kota Semarang yaitu sekitar 30 Pokdarwis yang mendapat koordinasi oleh Disbudpar Kota Semarang. Sehingga Disbudpar Kota Semarang tidak melakukan koordinasi secara langsung ke desa wisata, melainkan koordinasi dengan Pokdarwis-Pokdarwis di Kota Semarang. Koordinasi yang dilakukan tersebut terutama koordinasi ketika ada pelatihan-pelatihan ataupun lomba Pokdarwis yang diadakan oleh Disbudpar Kota Semarang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Disbudpar Kota Semarang sebagai berikut:

“Kalau koordinasi ke Nongkosawit itu tidak, kita koordinasi ke semua Pokdarwis secara menyeluruh” (Taufiq, 2023).

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, Disbudpar Kota Semarang juga tidak secara langsung berkoordinasi dengan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit. Koordinasi yang dilakukan oleh Disbudpar dengan Desa Wisata Nongkosawit yaitu melalui Pokdarwis Kandang Gunung yang berada di Desa Wisata Nongkosawit. Pada koordinasi Disbudpar dan Pokdarwis Kandang Gunung, aparat Kelurahan Nongkosawit sebagai penghubung koordinasi antara Disbudpar dan Pokdarwis Kandang Gunung. Peran Kelurahan Nongkosawit sebagai penghubung Koordinasi antara Disbudpar Kota Semarang dan Pokdarwis Kandang Gunung ini untuk mengkoordinir terkait program pelatihan maupun lomba Pokdarwis yang diadakan oleh Disbudpar, pihak Kelurahan berkoordinasi dengan Pokdarwis untuk mengirimkan perwakilannya sebagai peserta dalam pelatihan maupun lomba

tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah dari Desa Wisata Nongkosawit sebagai berikut:

“Kelurahan Nongkosawit sebagai penghubung yaitu menjembatani antara Dinas Pariwisata dengan Pokdarwis. Ketika ada pelatihan-pelatihan begitu kita berkoordinasi mengirimkan orang untuk mengikuti pelatihan” (Al Choiri, 2023).

Koordinasi antara Disbudpar Kota Semarang dengan pengelola Desa Wisata Nongkosawit terjalin dengan baik. Namun, tidak terdapat koordinasi secara khusus yang diberikan oleh Disbudpar Kota Semarang kepada Desa Wisata Nongkosawit. Koordinasi yang diberikan oleh Disbudpar secara menyeluruh seperti yang diberikan kepada Pokdarwis lainnya yang ada di Kota Semarang. Sehingga pelatihan-pelatihan yang diperoleh Desa Wisata Nongkosawit merupakan pelatihan yang diberikan kepada seluruh Pokdarwis di Kota Semarang dari Disbudpar Kota Semarang. Untuk itu, belum terdapat koordinasi terkait pengembangan potensi yang menjadi ciri khas di setiap desa wisata di Kota Semarang.

Sosialisasi dari Disbudpar terkhusus untuk Desa Wisata Nongkosawit baru diberikan beberapa kali pada akhir-akhir ini. Sosialisasi pembinaan tersebut hanya diikuti oleh perwakilan dari beberapa warga saja, banyak warga yang belum memiliki keinginan dan mengikuti pembinaan. Selain itu, informasi mengenai adanya sosialisasi pembinaan desa wisata belum tersebar secara merata kepada seluruh warga, banyak warga yang tidak mengetahui mengenai informasi tersebut

Gambar 5. 1 Sosialisasi Pembinaan Desa Wisata



(Sumber: Pokdarwis Kandang Gunung)

2. Koordinasi Pokdarwis dengan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit

Kelurahan berkoordinasi dengan Pokdarwis Kandang Gunung terkait proses pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit dan pelaksanaan program-program wisata yang telah ditentukan dan disepakati oleh Kelurahan, Pokdarwis, dan juga masyarakat. Koordinasi yang dilakukan terjalin dengan baik antara Kelurahan dan Pokdarwis selaku pihak penggerak saling berkomunikasi dalam proses pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Komunikasi yang terjalin tersebut berkaitan dengan fasilitas yang dibutuhkan, program-program yang akan dijalankan, proses pengembangan yang sedang dilakukan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Desa Wisata Nongkosawit.

Meskipun koordinasi dan komunikasi antara Kelurahan dan Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit terjalin dengan baik. Namun dalam pelaksanaan koordinasinya, Kelurahan dan Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit berkoordinasi secara nonformal, dimana koordinasi yang dilaksanakan oleh Kelurahan dan Pokdarwis hanya melalui beberapa orang saja tidak kepada seluruh anggota Pokdarwis. Koordinasi yang dilakukan tidak secara formal dan tidak terdapat jadwal khusus untuk melakukan pertemuan, evaluasi dan sebagainya. Komunikasi dan koordinasi yang sering dilakukan yaitu hanya

antara Kelurahan dan Ketua Pokdarwis saja dengan koordinasi yang dilakukan secara tidak formal dan tidak terjadwal. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Kelurahan Nongkosawit sebagai berikut:

“Untuk evaluasi khusus yang terjadwal gitu kita tidak ada, tapi kita sering bertemu dan berkomunikasi dengan Pokdarwis. Namun tidak secara formal berkomunikasi dengan seluruh anggota Pokdarwis, biasanya dengan beberapa orang saja seperti ketua Pokdarwis yang berkoordinasi dengan kami” (Al Choiri, 2023).

Selain itu, Kelurahan Nongkosawit bersama Pokdarwis Kandang Gunung saling berkoordinasi untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat Nongkosawit. Tujuan utama dari pemberian sosialisasi ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Nongkosawit akan desa wisata di daerah mereka. Sehingga dengan tingginya tingkat sadar wisata oleh masyarakat akan menjadikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata semakin meningkat juga. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata tersebut menjadi pondasi utama untuk keberhasilan bagi program Desa Wisata Nongkosawit.

Koordinasi oleh Kelurahan dan Pokdarwis Kandang Gunung terus dilakukan dengan mensosialisasikan desa wisata kepada masyarakat Nongkosawit. Pihak Kelurahan dan Pokdarwis terus mengupayakan agar seluruh masyarakat Nongkosawit dapat ikut serta dalam melaksanakan program-program Desa Wisata Nongkosawit. Peningkatan partisipasi masyarakat ini perlu dilakukan untuk keberhasilan pengembangan desa wisata karena masyarakat merupakan unsur pelaksanaan dari pengembangan tersebut. Sedangkan pihak Kelurahan dan Pokdarwis Kandang Gunung sebagai penggerak yang mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam pengembangan desa wisata yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5. 2 Sosialisasi Pembinaan Desa Wisata



(Sumber: Pokdarwis Kandang Gunung)

Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dinilai belum optimal, karena dalam koordinasi terkait pada sosialisasi desa wisata hanya dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan Kelurahan. Pertemuan yang diadakan oleh Kelurahan tersebut merupakan pertemuan yang diikuti oleh perwakilan dari masyarakat seperti RT dan RW. Pada pertemuan-pertemuan tersebut disampaikan terkait perlunya peran aktif dari masyarakat pada pelaksanaan program pengembangan desa wisata karena pelaku dari pengeolaan desa wisata merupakan masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kelurahan Nongkosawit:

“Kelurahan mensosialisasi untuk mensupport desa wisata yaitu ketika ada pertemuan-pertemuan kita selalu menyampaikan bahwa desa wisata perlu peran aktif dari masyarakat sekitar, karena pelaku-pelaku dari desa wisata kan masyarakat itu sendiri. Kita juga ikut memfasilitasi dan memberikan edukasi terutama kepada masyarakat yang di luar Pokdarwis” (Al Choiri, 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, koordinasi yang dilakukan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat masih melalui pada pertemuan-pertemuan Kelurahan saja, belum terdapat sosialisasi khusus yang diberikan

kepada seluruh masyarakat terkait desa wisata. Sehingga sosialisasi yang diberikan belum tersampaikan ke seluruh masyarakat karena pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari masyarakat.

B. Karakteristik Kelembagaan

Lingkungan implementasi kebijakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan dari kebijakan yang dirancang, analisis ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Grindle mengenai implementasi kebijakan. Grindle menjelaskan bahwa karakteristik lembaga dan rezim turut berpengaruh dalam keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Karakteristik lembaga dan penguasa yang cocok dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi lembaga yang tepat dalam memberikan pembinaan maupun bimbingan kepada Desa Wisata Nongkosawit dalam proses mengembangkan desa wisatanya. Lembaga pemerintahan yang sebagai penguasa dapat turut serta membantu dalam pemberian materi pendukung dalam pengembangan desa wisata seperti pembinaan dan infrastruktur.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memberikan program pembinaan kepada Desa Wisata Nongkosawit, namun pembinaan yang diberikan dirasa kurang dalam mensupport pengembangan desa wisata. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih berupa pembinaan secara menyeluruh untuk seluruh Pokdarwis di Kota Semarang, pembinaan yang tertuju khusus untuk Desa Wisata Nongkosawit tidak ada. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Taufiq selaku staff dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Divisi Kelembagaan.

“Kalau program yang khusus untuk Desa Wisata Nongkosawit kita tidak ada mba, pembinaan yang kita lakukan untuk seluruh Pokdarwis di Kota Semarang yang daftar”(Taufiq, 2023).

Tidak adanya pembinaan khusus yang diberikan dari lembaga penguasa kepada Desa Wisata Nongkosawit menyebabkan dalam pengelolaan desa wisatanya, para aktor merasa tidak mendapat dukungan serta keahlian khusus untuk mengelola potensi yang ada di Desa Wisata Nongkosawit. Sehingga dalam mengimplementasikan kebijakannya kurang kompeten karena tidak adanya wawasan dan keahlian yang lebih bagi para aktor pelaksana. Dinas Kebudayaan dan pariwisata sebagai lembaga penguasa diharapkan mampu

memberikan pembinaan yang sesuai dengan pengolahan potensi yang ada di Desa Wisata Nongkosawit.

Pokdarwis dan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit mempunyai gambaran-gambaran untuk mengembangkan desa wisatanya. Seperti pembuatan tracking pada wisata Curug Mah Tukung yang rencananya akan dibangun sebagai wisata alam yang besar di Desa Wisata Nongkosawit. Selain itu, pembentukan wisata lain seperti pengembangan peternakan yang lebih besar dan menambah jenis ternak sebagai wisata ternak yang lebih menarik. Namun dalam pelaksanaan perencanaan ini masih terkendala pada infrastrur yang kurang memadai dan tidak adanya dana sebagai penunjang pelaksanaannya. Pokdarwis dan aktor desa lainnya masih memerlukan pembinaan lain terutama pembinaan secara fisik yang terkhusus pada Desa Wisata Nongkosawit.

Pokdarwis masih membutuhkan sosialisasi yang difasilitasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara langsung untuk diberikan kepada warga desa. Karena sosialisasi yang hanya diberikan oleh Pokdarwis dan aparat pemerintah dirasa tidak cukup dalam menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan desa wisata. Belum adanya pembinaan yang difasilitasi secara langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyebabkan banyak warga yang tidak mempunyai pemahaman yang cukup terkait desa wisata. Sosialisasi yang diberikan oleh Pokdarwis belum secara menyeluruh kepada masyarakat desa, sehingga berpengaruh pada implementasi kebijakan desa wisata.

Kelembagaan Pokdarwis juga sebagai salah satu penguasa dalam pengelolaan desa wisata, Pada struktur kepengurusannya saat ini kurang berjalan karena banyak anggota yang telah keluar ataupun berpindah tempat tinggal. Sehingga kepengurusan Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit perlu untuk dilakukan reorganisasi agar dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan ide dan gagasan baru dari kepengurusan yang baru. Kelembagaan Pokdarwis sendiri dari awal pembentukan hingga saat ini belum dilakukan perubahan yang secara terstruktur. Peran serta dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibutuhkan untuk menata ulang kepengurusan Desa Wisata Nongkosawit dalam pengelolaannya. Pembentukan kepengurusan yang baru dan lebih tertata diharapkan dapat

menjadi awal dari menghidupkan kembali Desa Wisata Nongkosawit yang saat ini masih stagnan.

Pada analisis model implementasi kebijakan menurut Grindle, kekuasaan dari para pihak atau rezim yang terlibat menjadi hal penting dalam lingkungan implementasi. Kekuasaan rezim akan turut menentukan keberhasilan dari pengeimplementasian program yang telah dirancang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pokdarwis, dan Kelurahan Nongkosawit menjadi rezim yang memiliki kekuasaan pada proses implementasi. Namun, kekuasaan dari para pihak ini belum mampu sepenuhnya memberikan pengaruh pada lingkungan implementasi. Hal ini terlihat dari adanya program-program yang belum dapat terlaksana secara maksimal dan kurangnya pemahaman dari masyarakat sekitar terkait pada desa wisata. Kegagalan pelaksanaan program-program tersebut karena adanya kendala-kendala yang terdapat pada proses implementasi dan belum mampu untuk diselesaikan oleh para rezim yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan para pihak yang belum terlibat secara penuh menjadikan kendala-kendala pada proses implementasi tersebut belum dapat terselesaikan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, implementasi kebijakan di Desa Wisata Nongkosawit belum didukung oleh karakteristik kelembagaannya. Karakteristik lembaga penguasa di lingkungan Desa Wisata Nongkosawit baik dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pokdarwis serta aparat kelurahan masih belum ideal. Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum memberikan pengaruh yang besar bagi pelaksanaan kebijakan Desa Wisata Nongkosawit. Dukungan dan fasilitasi dari Dinas Kebudayaan dirasa masih belum berpengaruh kepada pelaksanaan kebijakan karena kelembagaan Disbudpar yang masih menyeluruh kesemua Pokdarwis Kota Semarang. Kelembagaan Pokdarwis dan Kelurahan cukup memberikan dampak bagi pengembangan Kelurahan Nongkosawit yang saat ini bisa menjadi sebuah desa wisata. Pengelolaan desa wisata oleh Pokdarwis dan Kelurahan memberikan pengaruh dan manfaat bagi masyarakat desa, meskipun belum secara merata seluruh warga merasakannya.

Karakteristik kelembagaan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pokdarwis memiliki relasi yang cukup baik, namun terdapat kendala dalam komunikasi diantara keduanya. Kendala komunikasi yang ada yaitu terkait pada struktur kepengurusan Pokdarwis yang belum terdapat kejelasan pada struktur anggota kepengurusannya. Antara Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pokdarwis belum saling terbuka dalam pembahasan mengenai kepengurusan dan pelaksanaan program yang telah ditentukan. Sehingga dalam pelaksanaan program yang dibentuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, keterwakilan Desa Wisata Nongkosawit dalam mengikuti program sangat sedikit. Program pembinaan yang seharusnya ditujukan untuk seluruh warga secara bergantian, namun hanya diikuti oleh pengurus-pengurus Pokdarwis tertentu saja. Sehingga pembinaan yang diberikan tidak dapat merata keseluruh warga. Kemampuan dari para rezim yang berkuasa juga belum mampu untuk secara penuh untuk menjalankan program kebijakan yang ada. Kendala-kendala yang ada pada proses implementasi belum dapat diatasi oleh para pihak yang memiliki kekuasaan pada implementasi kebijakan.

C. Respon Masyarakat dan Kepatuhan Implementasi

Dalam pelaksanaan implementasi menurut Grindle respon dan kepatuhan para aktor yang terlibat perlu untuk dilihat sejauhmana respon dari para aktor dan respon seperti apa yang ada dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Respon dan Kepatuhan dari aktor pelaksana menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan, respon yang diberikan menjadi salah satu dasar yang akan membawa ke aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh aktor plaksana. Kepatuhan sebagai derajat pengukur untuk melihat sejauhmana kepatuhan dari para aktor pelaksana dan keterlibatan implementasi kebijakan. Sedikit atau tidak adanya derajat kepatuhan akan mempengaruhi pada proses implementasi, karena perencanaan implementasi yang sebelumnya sudah direncanakan tidak secara tepat dalam pelaksanaannya dengan tidak adanya kepatuhan.

Pada pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, program-program yang telah direncanakan untuk dijalankan juga menimbulkan respon didalam pelaksanaannya. Hal ini karena terdapat interaksi antara para *Stakeholder* yang

terlibat diantaranya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Kelurahan Nongkosawit, Pokdarwis Kandang Gunung, dan masyarakat sekitar Desa Wisata Nongkosawit. Pada pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Nongkosawit diperlukan respon yang baik antara para pengelola desa wisata, karena desa wisata tidak dapat dikelola hanya dengan satu pihak saja. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan dalam pengembangannya agar rencana-rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit terdapat perbedaan pandangan dalam relasi yang terjalin antara Disbudpar, Kelurahan, Pokdariws, dan masyarakat. Perbedaan pandangan dalam implementasi kebijakan tersebut berkaitan dengan respon dan kepatuhan masyarakat dalam keikutsertaan atau partisipasi ketika melaksanakan program-program pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Disbudpar memandang bahwa respon dan derajat kepatuhan masyarakat Desa Wisata Nongkosawit masih sangat sedikit, dimana peran aktif dalam pelaksanaan desa wisata hanya diikuti oleh orang-orang tertentu saja. Masyarakat belum secara keseluruhan ikut serta dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, hal ini disampaikan oleh Disbudpar Kota Semarang sebagai berikut:

“Masyarakat Nongkosawit masih belum aktif ya, peran dari masyarakatnya sendiri masih sangat minim. Paling yang sering terlibat itu dari Pokdarwisnya, orang yang ikut serta juga masing orang-orang itu aja” (Taufiq, 2023).

Sama seperti pandangan dari Disbudpar, pihak Kelurahan dan Pokdarwis Desa Wisata Nongkosawit juga memberikan pandangan dalam implementasi kebijakan bahwa respon masyarakat dan kepatuhan dalam partisipasi implementasi masih sangat sedikit. Masyarakat dinilai masih belum sadar akan wisata yang ada di daerah mereka, sehingga banyak masyarakat yang tidak ingin untuk ikut terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kelurahan:

“Masyarakat peran sertanya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, karena pemikiran mereka itu desa wisata ya ada objek wisatanya padahal desa wisata ini kan keunikan di desa yang kemudian dijadikan keunggulan wisata” (Al Choiri, 2023).

Pengurus atau ketua Pokdarwis Kandang Gunung di Desa Wisata Nogkosawit juga memberi pandangan yang serupa terkait respon dan kepatuhan masyarakat yang masih sangat sedikit. Masyarakat dianggap belum memiliki kepatuhan yang tinggi untuk ikut serta dalam implementasi kebijakan, respon masyarakat sangat sedikit dan bahkan banyak yang belum paham mengenai desa wisata. Pengurus Pokdarwis merespon bahwa masyarakat sulit untuk diajak ikutserta dalam pengembangan desa wisata. Peran masyarakat dalam pengelolaan desa wisata masih sangat sedikit untuk terlibat dalam desa wisata yang nantinya juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh pengurus Pokdarwis Kandang Gunung sebagai berikut:

“Keterlibatan masyarakat masih belum aktif ya, banyak masyarakat yang belum mau terlibat pada pelaksanaan desa wisata yang padahal desa wisata ini kan tujuannya juga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka” (Warsono, 2023).

Sedangkan dalam respon masyarakat sendiri, masyarakat berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Masyarakat tidak memberikan respon dan kepatuhan dalam implementasi karena merasa tidak diikutsertakan secara langsung dalam pelaksanaannya. Masyarakat berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat telah diwakilkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai pengelola desa wisata. Sehingga keikutsertaan masyarakat dianggap tidak diperlukan karena sudah terdapat pihak-pihak tertentu sebagai pengelola desa wisata. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Wisata Nongkosawit sebagai berikut:

“kalau ikut sih engga ya mba, paling biasa diwakilkan sama orang-orang yang biasanya ikut” (Narasumber K, 2023).

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Narasumber M yang juga merupakan warga dari Desa Wisata Nongkosawit terkait keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat Nongkosawit belum seluruhnya ikut terlibat dalam pengembangan desa wisata, warga yang terlibat masih beberapa dan hanya orang-orang tertentu saja. Keikutsertaan pemuda dalam pengembangan desa wisata juga masih sangat sedikit, belum banyak pemuda yang turut serta dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Hal ini disampaikan oleh Narasumber M sebagai berikut:

“Belum banyak yang ikut disini mba, mungkin orang-orang sekitar objek wisata sana yang ikut” (Narasumber M, 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, perbedaan pandangan masyarakat dan *stakeholder* lain dalam respon dan kepatuhan masyarakat menunjukkan bahwa komunikasi pada relasi antara masyarakat dengan aktor politik lainnya tidak terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan respon antara masyarakat dengan aktor politik lainnya yang menyebabkan kurang berjalannya pelaksanaan program desa wisata. Antara masyarakat sebagai pengelola dan aktor politik lain sebagai penggerak perlu memiliki relasi yang terjalin dengan baik diantara keduanya. Adanya perbedaan respon tersebut menunjukkan bahwa saat ini relasi yang terjalin dalam proses pengembangan Desa Wisata Nongkosawit tidak baik. Relasi yang belum berjalan secara baik ini menjadi pengaruh bagi pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Desa wisata yang seharusnya dapat berkembang dan maju sesuai tujuannya menjadi terhambat karena tidak ada relasi yang terikat antara para *Stakeholder* nya.

Kurangnya koordinasi antara *Stakeholder* menjadikan adanya perbedaan pandangan yang terjadi antara masyarakat dengan *Stakeholder* yang lain. Koordinasi yang masih secara nonformal dan sosialisasi yang kurang menyeluruh menjadikan rancangan-rancangan yang telah dibentuk tidak dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Karena koordinasi yang dilakukan

dengan pemberian sosialisasi ketika terdapat pertemuan-pertemuan yang hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat, tidak seluruh masyarakat ikut dalam pertemuan tersebut. Sehingga dalam hal ini masyarakat merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang diberikan oleh penggerak pengelola desa wisata. Sebagaimana yang disampaikan oleh warga sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi sampe sini belum ada ya mba” (Narasumber Y, 2023).

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Saudara Narasumber M, salah satu warga dari RW 1 Nongkosawit yang juga menyampaikan terkait sosialisasi tersebut.

“belum, belum ada sosialisasi sampe kesini” (Narasumber M, 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat Desa Wisata Nongkosawit belum keseluruhan mendapatkan sosialisasi mengenai desa wisata. Sosialisasi yang diberikan belum sampai pada setiap warga di Desa Wisata Nongkosawit, hal ini terlihat dari pernyataan warga yang merasa dirinya belum mendapatkan sosialisasi dari para aktor penggerak desa wisata. Belum meratanya sosialisasi yang diberikan kepada warga juga terlihat dari masih banyak warga yang belum paham mengenai desa wisata yang sebenarnya. Warga Desa Wisata Nongkosawit menganggap desa wisata perlu memiliki objek wisata seperti pada wisata-wisata umum lainnya.

Pada model teori implementasi oleh Grindle, dalam lingkungan implementasi perlu adanya kepatuhan dari para pelaksana program tersebut. Tingkat kepatuhan tersebut yang akan mempengaruhi pada jalannya keberhasilan implementasi. Melalui tingkat kepatuhan yang tinggi akan berpengaruh pada kelancaran proses pelaksanaan program. Tingkat kepatuhan yang ada di Desa Wisata Nongkosawit relatif sedikit, terdapat para pihak yang belum memiliki kepatuhan pada pelaksanaan kebijakan. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut terlihat pada saat pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada pelaksanaan program

pembinaan tersebut, Pokdarwis tidak secara patuh mengajukan perwakilannya secara bergantian untuk mengikuti program pembinaan tersebut. Keikutsertaan dalam pembinaan tersebut hanya diwakilkan oleh orang-orang tertentu saja, tidak secara bergantian sesuai yang diatur oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kurangnya tingkat kepatuhan Pokdarwis dalam pelaksanaan pembinaan tersebut dikarenakan tidak didukungnya tingkat kepatuhan dari masyarakat untuk secara bergantian ikutserta dalam pembinaan tersebut. Masyarakat tidak berkenan ikutserta dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan yang ada di Desa Wisata Nongkosawit juga sangat rendah. Pelaksanaan implementasi kebijakan hanya diikuti oleh sedikit masyarakat, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat tersebut karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi.

Kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang diberikan menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai desa wisata di daerah mereka. Sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terkait desa wisata dan berpandangan bahwa partisipasi masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan desa wisata. Sehingga tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan masih sangat sedikit, banyak masyarakat yang tidak memiliki kepatuhan pada pelaksanaan program. Hal ini yang mengakibatkan hingga saat ini partisipasi masyarakat masih menjadi kendala untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Koordinasi dan sosialisasi yang belum maksimal menjadi salah satu penyebab dari tidak terjalinnya relasi yang baik antar *Stakeholder* dalam mengimplementasikan kebijakan Desa Wisata Nongkosawit. Sehingga hal ini berpengaruh pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata membutuhkan peran serta dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaannya, Partisipasi masyarakat yang masih kurang dengan adanya relasi yang terjalin tidak baik menyebabkan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit saat ini masih terkendala.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit melalui model analisis implementasi kebijakan oleh Grindle terdapat dua aspek, yang pertama yaitu melalui analisis isi kebijakan. Pada pelaksanaannya, dengan melalui program yang telah dibentuk baik oleh Disbudpar maupun Pokdarwis memiliki tujuan untuk semakin mengembang desa wisata. Namun dalam implementasi program tersebut tidak berjalan dengan baik.
2. Program-program yang tidak berjalan dengan baik menjadikan dalam perubahan Kelurahan Nongkosawit sebagai desa wisata tidak dirasakan manfaatnya oleh warga secara merata.
3. Tidak berjalannya proses implementasi dikarenakan kurangnya kepedulian dari lembaga terkait seperti Disbudpar dan kelurahan dalam merespon kendala pendanaan yang berupa fisik untuk mengembangkan desa wisata.
4. Aspek yang kedua yaitu lingkungan implementasi yang membantu menganalisis terkait relasi yang terjalin antar para *Stakeholder*. Pada prosesnya, relasi yang terjalin antara para *Stakeholder* dalam proses implementasi terdapat perbedaan pandangan terkait respon masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan tidak adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
5. Perbedaan pandangan antara respon masyarakat dengan Dinas Pariwisata, Kelurahan dan Pokdarwis disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan untuk warga. Sehingga banyak warga yang tidak memiliki pemahaman mengenai desa wisata.

6. Karakteristik kelembagaan di Desa Wisata Nongkosawit juga belum ideal, kelembagaan yang secara kepengurusannya belum tertata dengan baik yang menyebabkan proses sosialisasi belum dapat dilakukan secara maksimal. Dukungan dalam bentuk fisik maupun non fisik dari lembaga penguasa sangat dibutuhkan oleh Desa Wisata Nongkosawit dalam mengembangkan desa wisatanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran atau pendapat yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Lebih luasnya sosialisai kepada masyarakat selaku aktor pelaksana dari proses implementasi pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, dengan memberikan sosialisasi yang secara khusus ditujukan untuk masyarakat Desa Wisata Nongkosawit dengan menggandeng kerjasama dari instansi pemerintah.
2. Dihidupkannya kembali program-program desa wisata yang telah dibentuk oleh Pokdarwis atas kesepakatan bersama dari masyarakat yang bertujuan pada kebersihan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Menggencarkan strategi kerjasama dengan mitra terkait untuk memperoleh dukungan dalam proses pengembangan desa wisata baik dukungan dalam bentuk finansial, pengetahuan dan keahlian yang sejalan dengan pelaksanaan program yang telah ditetapkan,.
4. Pengoptimalan potensi-potensi yang ada di desa dengan pembangunan potensi yang ada untuk menjadi salah satu ikon wisata yang akan menarik bagi wisatawan. Seperti pembangunan pada Curug Mah Tukung yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata, pelestarian tarian, makanan, dan tradisional yang menjadi salah satu ikon tersendiri bagi Desa Wisata Nongkosawit.
5. Peningkatan promosi dan branding pada produk-produk tradisonal yang ada di Desa Wisata Nongkosawit baik yang bersifat alam maupun buatan seperti Wayang Ringut, Gelang Genetrik, Wedang Rojo, Omah Pang agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, S. (2002). *Analisis Kebijakan, Dari Formula Kementransparansi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustina, I. (2020). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga*.
- Baehaqi, D. R. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Kebijakan Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*". Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cahyaningrum, A. N. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah*.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). *Aanalisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang*.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). *Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi)*.
- Ghello, A. L. (2021). *Implementasi Pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon Desa Widodomartani Kabupaten Sleman Yogyakarta*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. United States of America : Pricenton University Press.

- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hoogerwerf, A. (1983). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Indrianti, T., Ariefanto, L., & Halimi, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso.
- Ismiyarto. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*.
- Jumroh, & Pratama, M. Y. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Palembang: Insan Cendekia Mandiri.
- Mardiasmo, S. (2002). *Kepemerintahan dan Kemintraan*. Malang: Afritek YPN Malang.
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo).
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2015). PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Ni'mah, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Pada Kelompok Mina Sejahtera di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati).

- Padabain, F. A., & Nugroho, S. (2018). Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
- Paramitha, H. P. (2021). Dinamika Implementasi Kebijakan Desa Wisata "Mina Mangrove" Desa Tunggulsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Perspektif Politik dan Administrasi.
- Prameswari, G. N. (2021). Pengembangan Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pleh Pemerintah Desa Kalianyar.
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.
- Wahyuning, N., & Damayanti, M. (2018). Potensi Pengembangan Desa Kliwonan Sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen.
- Wulandari, I., & Sari, M. M. (2022). Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian di Kelurahan Nongkosawit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 982/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2023 12 April 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kelurahan Nongkosawit
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Kharisma Damayanti
NIM : 1906016128
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 19 Desember 2000
CP/e-mail : 089601047162
Nama Ayah/ Ibu : Sri Sumiyanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Getas, RT 04/RW 05 Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian di Disbudpar Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website : www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2993/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022 Semarang, 15 Desember 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Kharisma Damayanti
NIM : 1906016128
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 19 Desember 2000
CP/e-mail : 089601047162
Nama Ayah/ Ibu : Sri Sumiyanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Getas, RT 04/RW 05 Kelurahan Nongkosawit
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Subbag Akademik, Kemahasiswaan
Alumni
H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penelitian

Fokus Penelitian	Lingkup pertanyaan	Arah Pertanyaan	Informan
Impelentasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit	Kepentingan yang mempengaruhi	<ul style="list-style-type: none"> • Program yang dicetuskan • Tujuan pembentukan program 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga
	Tipe manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat dari keberadaan desa wisata dan pelaksanaan program pengembangan yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga
	Perubahan yang ingin dicapai	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan dan tujuan dari adanya program pengembangan desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga
	Pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses yang dilaksanakan dalam mengambil keputusan pada program pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga
	Pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan program pengembangan • Faktor pendorong dalam pengembangan • Faktor penghambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga

		atau kendala dalam pengembangan	
	Sumber daya yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumberdaya yang ada • Keunggulan dan kelemahan pada pemanfaatan sumberdaya • Ketersediaan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga
Relasi Antar Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit	Strategi dari pelaksana program	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan strategi dalam pelaksanaan • Komunikasi para aktor dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi • Keefektifan strategi yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga
	Karakteristik lingkungan lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dari aktor lembaga yang terlibat • Konflik komunikasi pada pelaksanaan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga
	Respon dari pelaksana pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Respon dari para pihak terkait • Respon positif dan negatif • Sejauhmana keterlibatan dari para pihak dalam merespon program pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Priwisata • Pokdarwis • Kelurahan Setempat • Warga

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Staf Disbudpar



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Lurah Nongkosawit



Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Pokdarwis dan Masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Kharisma Damayanti
NIM : 1906016128
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 19 Desember 2000
Alamat : Getas, RT 04/RW 05 Kelurahan Nongkosawit
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 089601047162
Email : kharismadamayanti19@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi 25 Kandri (Tahun 2006)
SD Negeri 01 Kandri (Tahun 2013)
SMP N 22 Semarang (Tahun 2016)
SMA N 12 Semarang (Tahun 2019)